



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mudah sebagai satu keutuhan informasi diperlukan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip;
- b. bahwa untuk menerapkan dan mengimplementasikan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menyusun

pedoman terkait sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

- Mengingat :
1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat atau diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.

4. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan.
5. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip Dinamis berdasarkan kewenangan Penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
6. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanannya.
7. Biasa/Umum/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
8. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
9. Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
10. Sangat Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
11. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

12. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis memuat:
- a. kode klasifikasi;
  - b. jenis Arsip;
  - c. klasifikasi keamanan;
  - d. hak akses;
  - e. dasar pertimbangan; dan
  - f. unit pengolah.
- (2) Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis fasilitatif; dan
  - b. sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis substantif.

Pasal 3

- (1) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja.
- (2) Kode Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. masalah utama;
  - b. submasalah; dan
  - c. sub-submasalah.
- (3) Masalah utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan kode huruf sebanyak 2 (dua) digit.
- (4) Submasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan kode angka sebanyak 2 (dua) digit.
- (5) Sub-submasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menggunakan kode angka sebanyak 2 (dua) digit.

Pasal 4

Jenis Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa Arsip yang merupakan bagian dari klasifikasi Arsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai klasifikasi Arsip.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terbagi menjadi 4 (empat) tingkat klasifikasi keamanan yang meliputi:
  - a. Biasa/Umum/Terbuka;
  - b. Terbatas;
  - c. Rahasia; dan
  - d. Sangat Rahasia.
- (2) Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul dalam hal informasi yang terdapat dalam Arsip Dinamis disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan kepentingan yang tidak sah.
- (3) Pengaturan akses dan teknis pengamanan dilakukan terhadap tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengaturan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan tingkat klasifikasi keamanan Arsip yang lebih tinggi dilakukan pengaturan akses yang lebih ketat.
- (5) Teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan tingkat klasifikasi keamanan Arsip yang lebih tinggi dilakukan teknis pengamanan yang lebih tinggi.

Pasal 6

- (1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan kepada pejabat tertentu yang memiliki

kewenangan dan tanggung jawab dalam pembuatan, penanganan, pengelolaan keamanan fisik, dan informasi Arsip.

- (2) Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pimpinan tinggi madya;
  - b. pimpinan tinggi pratama;
  - c. pejabat administrator;
  - d. pejabat pengawas; dan
  - e. kepala satuan kerja.
- (3) Pejabat dengan kedudukan yang lebih tinggi dapat mengakses Arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf di bawahnya sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur organisasi.
- (4) Pejabat atau staf dengan kedudukan yang lebih rendah tidak dapat mengakses Arsip yang dibuat oleh pejabat di atasnya kecuali sebelumnya telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 7

- (1) Arsip Dinamis dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menteri yang dapat mengakses seluruh Arsip;
  - b. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan yang dapat mengakses Arsip di bawah kewenangannya, tapi tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada Menteri dan/atau pimpinan tingkat tinggi di luar unit organisasinya yang memiliki hak akses, kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan terkait;

- c. Staf ahli yang dapat mengakses seluruh Arsip sesuai bidangnya setelah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi madya yang memiliki hak akses;
  - d. Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang dapat mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak dapat mengakses Arsip yang terdapat pada pimpinan level yang lebih tinggi dan/atau yang satu level di dalam atau di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi yang memiliki hak akses;
  - e. Koordinator, Sub Koordinator, Arsiparis, dan Aparatur Sipil Negara yang dapat mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya dengan tingkat klasifikasi Biasa/Umum/Terbuka tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia yang terdapat pada Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
  - f. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pengawas eksternal yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam

- melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. aparat penegak hukum yang mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum; dan
  - c. publik yang dapat mengakses informasi dengan tingkat klasifikasi Biasa/Umum/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e meliputi Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam:

- a. tingkat klasifikasi keamanan Biasa/Umum/Terbuka merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja;
- b. tingkat klasifikasi keamanan Terbatas merupakan Arsip yang bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis;
- c. tingkat klasifikasi keamanan Rahasia merupakan Arsip yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum, menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi; dan
- d. tingkat klasifikasi keamanan Sangat Rahasia merupakan Arsip yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.

#### Pasal 9

Unit pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f merupakan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap keselamatan, keamanan fisik, dan informasi Arsip.

#### Pasal 10

Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

- (1) Tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diperlukan Pengamanan Arsip Dinamis terhadap Arsip maupun informasi yang terkandung di dalamnya.
- (2) Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis:
  - a. penyimpanan Arsip;
  - b. prasarana dan sarana penyimpanan Arsip;
  - c. penggunaan Akses Arsip;
  - d. penyampaian/pengiriman Arsip; dan
  - e. petugas pelaksana.
- (3) Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan tingkat klasifikasi keamanan dengan memperhatikan media Arsip.
- (4) Petugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pejabat fungsional arsiparis dan/atau pegawai negeri sipil sebagai petugas pengolah Arsip yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi pratama di masing-masing unit kerjanya.

#### Pasal 12

Pengamanan Arsip Dinamis tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 924



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES  
ARSIP DINAMIS

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS**

**A. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Fasilitatif**

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I</b> 1	<b>HK</b> HK01 HK0101	<b>HUKUM</b> Produk Hukum Produk Hukum Bersifat Pengaturan a. Penyusunan Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: 1) Naskah akademik	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		3) Rancangan awal	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		4) Rancangan akhir sampai konsep net	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		5) Telaah hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		6) Harmonisasi peraturan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		7) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah disahkan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		b. Penyusunan Peraturan Pemerintah: 1) Naskah akademik	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		3) Rancangan awal	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		4) Rancangan akhir sampai konsep net	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		5) Telaah hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		6) Harmonisasi peraturan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		7) Peraturan Pemerintah yang telah disahkan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		c. Penyusunan Peraturan/Keputusan/ Instruksi Presiden:				
		1) Naskah akademik	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		3) Rancangan awal	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		4) Rancangan akhir sampai konsep net	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		5) Telaah hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		6) Harmonisasi peraturan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		7) Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden yang telah disahkan	Biasa/Umum/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		d. Penyusunan Peraturan Menteri:				
		1) Naskah akademik	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		3) Rancangan awal	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		4) Rancangan akhir sampai konsep net	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		5) Telaah hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		6) Harmonisasi peraturan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		7) Peraturan Menteri yang telah disahkan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		e. Instruksi/Surat Edaran Menteri, Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Administrator:				

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		1) Naskah akademik	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		2) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		3) Rancangan awal	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		4) Rancangan akhir sampai konsep net	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		5) Telaah hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		6) Instruksi/Surat Edaran Menteri, Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Administrator yang telah disahkan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	HK0102	<p>Produk Hukum Bersifat Penetapan</p> <p>a. Keputusan Menteri, Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Administrator:</p> <p>1) Naskah akademik</p> <p>2) Rancangan awal</p> <p>3) Rancangan akhir sampai konsep net</p> <p>4) Telaah hukum</p> <p>5) Keputusan Menteri, Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Administrator yang telah disahkan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Biro Hukum</p> <p>Biro Hukum</p> <p>Biro Hukum</p> <p>Biro Hukum</p> <p>Biro Hukum</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2	HK02 HK0201	Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri a. Nota Kesepahaman / <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) / <i>Letter of Intent</i> (LOI) / Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
	HK0202	Perjanjian Kerjasama Luar Negeri a. Nota Kesepahaman / <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) / <i>Letter of Intent</i> (LOI) / Perjanjian Kerjasama Luar Negeri	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
3	HK03	Sosialisasi/Penyuluhan/ Pembinaan Hukum	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
4	HK04	Dokumentasi Hukum Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan yang dijadikan referensi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5	HK05	Hak Atas Kekayaan Intelektual a. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  b. Hasil Kekayaan Intelektual  c. Permohonan yang ditolak  d. Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual	Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum  Biro Hukum  Biro Hukum  Biro Hukum
6	HK06 HK0601	Advokasi Hukum Advokasi Hukum Perdata a. Surat Perjanjian Konsultasi atau Bantuan dan Advokasi Hukum  b. Bantuan hukum	Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum  Biro Hukum

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Arbitrase  d. Rekomendasi ombudsman  e. Opini hukum Kontrak Konstruksi, dalam suatu paket pekerjaan bidang PUPR	Terbatas  Terbatas  Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Hukum  Biro Hukum  Biro Hukum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		f. Kasus/sengketa hukum	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Hukum
		g. Laporan Hasil Advokasi Hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
	HK0602	Advokasi Hukum Pidana				
		a. Surat Perjanjian Konsultasi atau Bantuan dan Advokasi Hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		b. Bantuan hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		c. Rekomendasi ombudsman	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Opini hukum Kontrak Konstruksi, dalam suatu paket pekerjaan bidang PUPR	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Biro Hukum
		e. Kasus/sengketa hukum	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Biro Hukum
		f. Laporan Hasil Advokasi Hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
	HK0603	Advokasi Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara a. Surat Perjanjian Konsultasi atau Bantuan dan Advokasi Hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Bantuan hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		c. Rekomendasi ombudsman	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
		d. Opini hukum Kontrak Konstruksi, dalam suatu paket pekerjaan bidang PUPR	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Biro Hukum
		e. Kasus/sengketa hukum	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Biro Hukum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		f. Laporan Hasil Advokasi Hukum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Hukum
<b>II</b> 1	<b>HL</b> HL01 HL0101	<b>HUBUNGAN LUAR NEGERI</b> Kerjasama Bilateral Pinjaman Luar Negeri a. Rancangan awal b. Data pendukung c. Hasil pembahasan d. Rancangan akhir sampai konsep net e. Laporan f. MoU/Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
	HL0102	Hibah Luar Negeri a. Rancangan awal b. Data pendukung c. Hasil pembahasan d. Rancangan akhir sampai konsep net e. Laporan f. MoU/Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
	HL0103	Negosiasi Luar Negeri a. Rancangan awal b. Data pendukung c. Hasil pembahasan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Rancangan akhir sampai konsep net e. Laporan f. MoU/Perjanjian Kerjasama				
	HL0104	Kerjasama Teknik Luar Negeri a. Rancangan awal b. Data pendukung c. Hasil pembahasan d. Rancangan akhir sampai konsep net e. Laporan f. MoU/Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
	HL0105	Kerjasama Infrastruktur Luar Negeri a. Rancangan awal b. Data pendukung c. Hasil pembahasan d. Rancangan akhir sampai konsep net e. Laporan f. MoU/Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
2	HL02 HL0201	Kerjasama Multilateral Pinjaman Luar Negeri a. Rancangan awal b. Data pendukung	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Hasil pembahasan d. Rancangan akhir sampai konsep net e. Laporan f. MoU/Perjanjian Kerjasama				
	HL0202	Hibah Luar Negeri a. Rancangan awal b. Data pendukung c. Hasil pembahasan d. Rancangan akhir sampai konsep net e. Laporan f. MoU/Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
	HL0203	Negosiasi Luar Negeri a. Rancangan awal b. Data pendukung c. Hasil pembahasan d. Rancangan akhir sampai konsep net e. Laporan f. MoU/Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
	HL0204	Kerjasama Teknik Luar Negeri a. Rancangan awal b. Data pendukung c. Hasil pembahasan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Rancangan akhir sampai konsep net e. Laporan f. MoU/Perjanjian Kerjasama				
	HL0205	Kerjasama Infrastruktur Luar Negeri a. Rancangan awal b. Data pendukung c. Hasil pembahasan d. Rancangan akhir sampai konsep net e. Laporan f. MoU/Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
3	HL03	Kerjasama Lembaga Swasta/ <i>Non Government Organization</i> a. Rancangan awal b. Data pendukung c. Hasil pembahasan d. Rancangan akhir sampai konsep net e. Laporan f. MoU/Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
4	HL04	Administrasi Perjalanan Luar Negeri a. Surat Perjalanan RI (pasport biasa) dan dokumen perjalanan lainnya untuk WNI b. Pas Lintas Batas c. Kartu Kedatangan dan Keberangkatan ( <i>Arrival and Departure Card</i> ) termasuk <i>Pax List</i> dan <i>Crew List</i> d. ABTC ( <i>Asia Pacific Economic Corporation Bussines Travel Card</i> ) <i>Smart Card</i>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
<b>III</b> 1	<b>HM</b> HM01	<b>HUBUNGAN MASYARAKAT</b> Publikasi Informasi a. Konferensi pers/siaran pers/ <i>press release</i> b. Kunjungan wartawan/peliputan c. Wawancara d. Program layanan informasi e. Monitoring layanan informasi f. <i>Branding</i>	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Komunikasi Publik

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2	HM02	Dokumentasi Informasi a. Dokumentasi acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa dalam berbagai media b. Dokumentasi karya monumental bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Komunikasi Publik
3	HM03	Penerbitan a. Usulan artikel/makalah b. Hasil penerbitan buletin/majalah/ jurnal	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Komunikasi Publik
4	HM04	Dengar Pendapat/ <i>Hearing</i> a. Draft laporan pimpinan untuk RDP b. Hasil/Notulensi RDP	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Komunikasi Publik
5	HM05 HM0501	Hubungan Antar Lembaga Lembaga Negara a. Surat usulan hubungan antarkementerian/ lembaga negara dan pemda b. Bukti pelaksanaan kegiatan hubungan c. Laporan kegiatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Komunikasi Publik

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	HM0502	Organisasi Infrastruktur Nasional a. Surat usulan hubungan dengan organisasi infrastruktur nasional b. Bukti pelaksanaan kegiatan hubungan c. Laporan kegiatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Komunikasi Publik
	HM0503	Perusahaan a. Surat usulan hubungan dengan BUMN/ BUMD/ Perusahaan/ Lembaga Perbankan b. Bukti pelaksanaan kegiatan hubungan c. Laporan kegiatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Komunikasi Publik
	HM0504	Organisasi Kemasyarakatan a. Surat usulan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan b. Bukti pelaksanaan kegiatan hubungan c. Laporan kegiatan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Komunikasi Publik

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	HM0505	Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) a. Bukti pelaksanaan kegiatan Bakohumas b. Laporan kegiatan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Komunikasi Publik
	HM0506	Perguruan Tinggi/Sekolah a. Surat usulan hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah b. Bukti pelaksanaan kegiatan hubungan c. Laporan kegiatan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Komunikasi Publik
6	HM06	Peran Masyarakat a. Laporan kegiatan penyuluhan/ diseminasi b. Laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi c. Laporan kegiatan kerja sama	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Komunikasi Publik
<b>IV</b> 1	<b>KP</b> KP01 KP0101	<b>KEPEGAWAIAN</b> Perencanaan Pegawai Analisa Jabatan a. Informasi Jabatan b. Uraian Tugas Jabatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Inventarisasi Jabatan d. Spesifikasi atau persyaratan jabatan e. Daftar Urut Kepangkatan				
	KP0102	Analisa Beban Kerja a. Hasil Inventarisasi Analisa Jabatan b. Persyaratan Pendidikan Yang Dibutuhkan c. Analisa Jabatan dan Beban Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
	KP0103	Formasi Kepegawaian a. Usulan dari Unit Kerja b. Usulan permintaan formasi pegawai ke Menpan c. Persetujuan Menpan d. SK Penetapan Formasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
2	KP02 KP0201	Pengadaan Pegawai Penerimaan a. Proses Penerimaan Pegawai: 1) Pengumuman	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) Pelaksanaan Ujian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		3) Keputusan Hasil Ujian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		4) Wawancara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		b. Penetapan pengumuman kelulusan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		c. Berkas lamaran yang tidak diterima	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
	KP0202	Pengangkatan CPNS dan pengangkatan CPNS menjadi PNS	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		a. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP				
		b. Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS				

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan Surat Keputusan Pengangkatan PNS				
	KP0203	Penempatan a. Surat Perintah/Surat Tugas/Surat Izin/Surat Keterangan Penempatan CPNS atau PNS b. Surat Pernyataan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
	KP0204	Penerimaan dan Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) / Non PNS a. Proses Penerimaan Pegawai: 1) Pengumuman  2) Seleksi Administrasi	Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		3) Pemanggilan Peserta Tes	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		4) Pelaksanaan Ujian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		5) Keputusan Hasil Ujian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		6) Wawancara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		b. Penetapan pengumuman kelulusan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		c. Berkas lamaran yang tidak diterima	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		d. Surat Keputusan Penempatan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		e. Surat Perjanjian Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		f. Surat Perintah Melaksanakan Tugas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
3	KP03  KP0301	Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan Ujian Penyesuaian Ijazah a. Surat Pemberitahuan Ujian Penyesuaian Ijazah b. Surat Usulan dari Unor/Unit Kerja c. Surat Usulan Permintaan Formasi kepada Kepala BKN d. Persetujuan Kepala BKN e. Pemanggilan Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah f. Laporan Kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
	KP0302	Ujian Dinas a. Surat Usulan Peserta Ujian Dinas dari Unit Organisasi/Unit Kerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Surat Pemanggilan Peserta Ujian Dinas  c. Berkas Perorangan Ujian Dinas (SK Pangkat II/d bagi yang akan naik pangkat ke Gol III/a atau SK Pangkat III/d bagi PNS yang akan naik pangkat ke Golongan IV/a, dan SKP Tahun Terakhir  d. Surat Perintah/Surat Tugas  e. Laporan Kegiatan Ujian Dinas	Biasa/Umum/ Terbuka  Rahasia  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	KP0303	<p>Ujian Kompetensi</p> <p>a. Surat Usulan Peserta Ujian Kompetensi Unit Organisasi/Unit Kerja</p> <p>b. Surat Pemanggilan Peserta Ujian Kompetensi</p> <p>c. Surat Perintah/Surat Tugas</p> <p>d. Berkas perorangan ujian kompetensi seperti Biodata Peserta, dan persyaratan ujian kompetensi lainnya</p>	<p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Administrator</p> <p>Pejabat Administrator</p> <p>Pejabat Administrator</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Pusat Pengembangan Talenta dan Balai Penilaian Kompetensi</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		e. Hasil ujian kompetensi 1) Rekap nilai hasil ujian kompetensi seluruh peserta 2) Hasil nilai ujian kompetensi perseorangan  f. Laporan Kegiatan Ujian Kompetensi	Rahasia          Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama          Pejabat Administrator	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi          Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Talenta dan Balai Penilaian Kompetensi          Pusat Pengembangan Talenta dan Balai Penilaian Kompetensi
4	KP04 KP0401	Mutasi Kenaikan dan Penyesuaian Pangkat/ Golongan a. Surat Usulan Kenaikan/ golongan/ jabatan dari Unit Organisasi/Unit Kerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Nota Persetujuan Teknis Kepala BKN  d. SK Kenaikan Pangkat dari presiden khusus Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional Utama  e. SK Peninjauan Masa Kerja  f. SK Kenaikan Pangkat Anumerta (Surat Tugas, Surat Keterangan Meninggal karena tugas, dan Surat Keterangan Anumerta dari pejabat berwenang, dan BUP)  g. Surat Keputusan Kenaikan dan Penyesuaian Pangkat/Golongan	Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas  Terbatas  Terbatas  Terbatas	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	KP0402	Rotasi Kerja a. Surat Usulan Rotasi Kerja  b. Nota Persetujuan  c. Surat Keputusan/Surat Perintah/ Surat Tugas Rotasi Kerja	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala Biro Kepegawaian dan Ortala Biro Kepegawaian dan Ortala
	KP0403	Alih Tugas a. Surat Permohonan Alih Tugas  b. Nota Persetujuan  c. Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat Tugas Alih Tugas	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala Biro Kepegawaian dan Ortala Biro Kepegawaian dan Ortala
	KP0404	Penempatan Kembali a. Laporan Selesai Melaksanakan Pendidikan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. SK Perbantuan/dipekerjakan di luar instansi induk c. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/dipekerjakan d. Surat Keputusan/ Surat Perintah/ Surat Tugas Penempatan Kerja/ Pengangkatan kembali	Terbatas  Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala
5	KP05  KP0501	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural  Pengangkatan Jabatan a. Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Berkas Baperjakat	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepegawaian dan Ortala
		c. SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		d. Surat Keterangan Menduduki Jabatan/Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		e. Berita Acara Pelantikan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KP0502	Pemberhentian Jabatan a. Usulan Pemberhentian Jabatan Struktural  b. SK Pemberhentian/ Pembebasan dari Jabatan Struktural	Rahasia  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	KP06 KP0601	Administrasi Kepegawaian Data Pegawai a. Berkas perseorangan kepegawaian/ ASN: 1) Lamaran yang diterima 2) Nota Penetapan NIP dan kelengkapannya 3) Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 4) SK Pengangkatan PNS 5) Hasil Pengujian Kesehatan 6) SK Pengangkatan PNS 7) SK Peninjauan Masa Kerja 8) SK Kenaikan Pangkat 9) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan 10) Surat Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan 11) Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		12) SK Perpindahan Wilayah Kerja 13) SK Perpindahan Antarinstansi 14) SK Cuti di Luar Tanggung Negara (CTLN) 15) Berita Acara Pemeriksaan 16) SK Hukuman Jabatan/ Hukuman Disiplin PNS 17) SK Perbantuan/ Dipekerjakan/ Penugasan di luar Instansi Induk 18) SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerja kan/Penugasan 19) SK Pemberian Uang Tunggu 20) SK Pemberhentian sebagai PNS 21) SK Pemberhentian/ Pembebasan Sementara				

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		22) SK Pengangkatan/ Pemberhentian sebagai Pejabat Negara  23) SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena Diangkat sebagai Pejabat Negara  24) SK Pengalihan PNS 25) Surat Keterangan Pernyataan Hilang 26) Surat Keterangan Kembalinya PNS yang Dinyatakan Hilang 27) SK Penggantian Nama 28) Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran 29) Akta Nikah/Cerai 30) Akta Kelahiran 31) Isian Formulir PUPNS 32) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan				

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		33) Surat Permohonan Menjadi Anggota Partai Politik  34) Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang  35) Surat Keterangan Mutasi Keluarga  36) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan  37) Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional  38) Surat Keterangan Hasil penelitian Khusus  39) Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala  40) Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri  41) Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri  42) Surat Persetujuan dan SK Perubahan Data Dasar/Status/ Kedudukan Hukum				

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		43) Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS 44) Ijazah/Sertifikat 45) SK Penempatan/ Penarikan Pegawai 46) SK Pengangkatan pada Jabatan Kedinasan di luar Instansi Induk 47) Surat Pertimbangan Status PNS 48) SK Pengaktifan Kembali sebagai PNS 49) Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah 50) SK Penghargaan dan Tanda Jasa 51) SK Pensiun				

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Berkas perseorangan Menteri	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepegawaian dan Ortala
		c. Berkas perseorangan PPPK	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepegawaian dan Ortala
	KP0602	Absensi Pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	KP0603	Kartu-kartu Kepegawaian a. Dokumentasi Identitas Pegawai: 1) Usul Penetapan Kartu 2) Keanggotaan Organisasi 3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)/ SPT Tahunan/ NPWP 4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) b. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
	KP0604	Tanda Jasa a. Penghargaan dan tanda jasa: 1) Satya Lencana Karya Satya 10, 20, 30 Tahun 2) Penghargaan Wirakarya 3) Penghargaan Pembangunan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		4) Penghargaan Anumerta				
	KP0605	Penggajian a. SK Gaji Berkala b. SK Penyesuaian Gaji c. Daftar gaji/ tunjangan/ lembur/ honorarium	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
	KP0606	Penyesuaian Masa Kerja a. Usulan Penyesuaian dari Unit Organisasi/Unit Kerja b. SK Terakhir	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
	KP0607	Penyesuaian Kelas Jabatan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
7	KP07	Cuti Pegawai a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Bersalin e. Cuti Karena Alasan Penting f. Cuti di Luar Tanggungan Negara	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
8	KP08 KP0801	Pembinaan Pegawai Penilaian Prestasi Kerja a. Penilaian prestasi kerja: 1) Formulir SKP 2) Formulir Penilaian Prestasi Kerja 3) Formulir Penilaian Perilaku 4) Formulir Penilaian Kinerja b. Hasil penilaian kinerja dan standar kerja: 1) Sistem penilaian kinerja ASN 2) Standar kinerja jabatan pegawai ASN 3) Penilaian kinerja pegawai ASN c. Hasil evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	KP0802	Pembinaan Pembentukan Karakter Pegawai				
		a. Perencanaan pembentukan karakter pegawai	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		b. Pelaksanaan kegiatan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		c. Laporan kegiatan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		d. Sertifikat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		e. Kode etik pegawai	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	KP0803	Hukuman Disiplin a. Surat Teguran (Sanksi) b. Surat Pernyataan tidak puas c. Surat Keputusan Penundaan/ Penurunan Pengkat/Golongan d. Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan e. Berita Acara Pemeriksaan f. Banding Gugatan g. Surat Keputusan Pemberian Sanksi Pegawai	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepegawaian dan Ortala
	KP0804	Penyelesaian Selisih/Sengketa Pegawai a. Surat usulan b. Surat Mediasi c. Surat Pernyataan d. SK Penetapan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
9	KP09 KP0901	Pengembangan Pegawai Perencanaan dan Pengembangan Karier a. Peta perencanaan dan pengembangan karir pegawai b. Pengembangan pola karir pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala dan Pusat Pengembangan Talenta
	KP0902	Keterampilan/Keahlian a. Surat Usulan b. Sertifikat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
	KP0903	Tugas Belajar dan Izin Belajar 1) Surat Permohonan Pendidikan 2) Surat Penugasan Pendidikan 3) Laporan telah melaksanakan tugas belajar dan izin belajar 4) Surat Pemberitahuan telah selesai melaksanakan tugas belajar dan izin belajar	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala dan Sekretariat BPSDM

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	KP0904	Sertifikasi Profesi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Organisasi/ Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional
10	KP10 KP1001	Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu a. Surat Usulan Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/Sertifikat c. SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Organisasi/ Unit Kerja Kerja Pengusul  Masing-masing Unit Organisasi/ Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	KP1002	Kenaikan Jenjang Pangkat/Jabatan a. Surat Usulan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jenjang Jabatan, dan Alih Jabatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Organisasi/ Unit Kerja Kerja Pengusul
		b. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Organisasi/ Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional
		c. Lembar Penetapan Angka Kredit (PAK)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Organisasi/ Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional
		d. SK Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jenjang Jabatan, dan Alih Jabatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	KP1003	Pemindahan Jabatan Fungsional Tertentu a. Surat Usulan  b. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)  c. Lembar Penetapan Angka Kredit (PAK)  d. Surat Keputusan	Terbatas  Terbatas  Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Organisasi/ Unit Kerja Kerja Pengusul  Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala
	KP1004	Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional Tertentu a. Surat Usulan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Organisasi/ Unit Kerja Kerja Pengusul

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Surat Keputusan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
	KP1005	Pemberhentian Jabatan Fungsional Tertentu a. Surat Usulan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Organisasi/ Unit Kerja Kerja Pengusul
		b. Surat Keputusan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
11	KP11 KP1101	Pemberhentian Pegawai Dengan Hormat a. Berkas usulan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
		b. SK Penetapan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
	KP1102	Tidak dengan Hormat a. Berkas usulan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. SK Penetapan  c. Penetapan Tanpa Hak Pensiun	Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala
12	KP12	Pensiun a. Berkas usulan  b. Nota Persetujuan BKN  c. Penetapan Pensiun	Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas  Terbatas	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala
<b>V</b> 1	<b>KU</b> KU01 KU0101	<b>KEUANGAN</b> Penganggaran Penyusunan Target dan Pagu Indikatif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) a. Usulan Proposal Indikatif dari Unit Organisasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Keuangan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Usulan Proposal Pagu Anggaran dari Unit Organisasi c. Proposal Pagu Indikatif Kementerian d. Proposal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga				
	KU0102	Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum (BLU)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
2	KU02 KU0201	Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai a. Daftar gaji b. Daftar tunjangan c. Daftar honorarium d. Daftar uang makan e. Daftar uang lembur	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0202	Belanja Barang dan Jasa a. Penagihan/ <i>invoice</i> , Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta data pendukung	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Data pendukungnya, antara lain: copy faktur pajak, nota kredit, dan lain-lain. c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima Barang d. Surat Permintaan Pembayaran				
	KU0203	Belanja Pemeliharaan a. Penagihan/ <i>invoice</i> , Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta data pendukung b. Data pendukungnya, antara lain: copy faktur pajak, nota kredit, dan lain-lain. c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima Barang d. Surat Permintaan Pembayaran	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0204	Belanja Sewa a. Penagihan/ <i>invoice</i> , Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta data pendukung	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Data pendukungnya, antara lain: copy faktur pajak, nota kredit, dan lain lain. c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima Barang d. Surat Permintaan Pembayaran				
	KU0205	Belanja Perjalanan a. Surat Tugas b. Dokumen perjalanan dinas meliputi lembar kuitansi, lembar pengeluaran riil, tiket pesawat/kereta, lembar boarding pass pesawat/kereta, kuitansi hotel/penginapan	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0206	Belanja Bantuan Pemerintah	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0207	Belanja Modal Tanah a. Dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah beserta anggarannya.	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>b. Permohonan pembayaran dana Pengadaan Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti pembayaran yang diajukan oleh Badan Usaha dan telah disetujui oleh Kementerian/ Lembaga yang memerlukan tanah, surat pernyataan tanggungjawab dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah pada Kementerian/ Lembaga yang memuat kebenaran pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak</li> <li>- Pernyataan bertanggungjawab sepenuhnya atas pembayaran Ganti Kerugian</li> </ul>				

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pernyataan kesediaan menyetorkan uang Ganti Kerugian apabila terdapat kesalahan pembayaran dan/atau kelebihan pembayaran</li> <li>- Bukti hak atas tanah atau dokumen pendukung.</li> <li>c. Dokumen pendukung yang harus dipenuhi Menteri/Kepala dan Badan Usaha</li> <li>d. Nota kesepahaman dengan Menteri mengenai pembayaran yang harus dilakukan oleh Menteri</li> </ul>				
	KU0208	Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1) Penagihan/invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta data pendukung 2) Data pendukungnya, antara lain: <i>copy</i> faktur pajak, nota kredit, dan lain lain.	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/ Serah Terima Barang  4) Surat Permintaan Pembayaran				
	KU0209	Belanja Modal Gedung dan Bangunan  a. Dokumen Pelaksanaan belanja modal Gedung dan Bangunan, antara lain berupa Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi:  Dokumen pemilihan berupa: 1) Dokumen Umum  2) Pengumuman Pelelangan  3) Dokumen Instruksi Kepada Peserta  4) Lembar Data Pemilihan  5) Bentuk Dokumen Penawaran	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>6) Dokumen Penawaran berupa: (Surat Penawaran, Surat Kuasa, Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), Dokumen Penawaran Teknis, Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN, Jaminan Penawaran).</p> <p>b. Dokumen Pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin, antara lain berupa:</p> <p>1) Penagihan/<i>invoice</i>, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta data pendukung</p> <p>2) Data pendukungnya, antara lain: <i>copy</i> faktur pajak, nota kredit, dan lain lain.</p>				

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima Barang 4) Surat Permintaan Pembayaran				
	KU0210	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan a. Dokumen pemilihan terdiri atas: 1) Dokumen Umum 2) Instruksi Kepada Peserta 3) Lembar Data Pemilihan b. Dokumen Penawaran meliputi: 1) Surat Penawaran 2) Surat Kuasa 3) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) 4) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN 5) Jaminan Penawaran 6) Analisa Harga Satuan Pekerjaan	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
		c. Dokumen Pelaksanaan				

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan antara lain berupa: 1) Penagihan/ <i>invoice</i> , Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta data pendukung 2) Data pendukungnya, antara lain: <i>copy</i> faktur pajak, nota kredit, dan lain lain. 3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/ Serah Terima Barang 4) Surat Permintaan Pembayaran				
	KU0211	Belanja Modal Aset Lainnya a. Penagihan/ <i>invoice</i> , Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta data pendukung b. Data pendukungnya, antara lain: <i>copy</i> faktur pajak, nota kredit, dan lain lain.	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima Barang d. Surat Permintaan Pembayaran				
	KU0212	Belanja Lainnya a. Penagihan/ <i>invoice</i> , Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta data pendukung b. Data pendukungnya, antara lain: <i>copy</i> faktur pajak, nota kredit, dan lain lain. c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima Barang d. Surat Permintaan Pembayaran	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
3	KU03	Pengeluaran Anggaran a. Surat permintaan pembayaran (SPP, SPP-GU, SPP-LS, SPP-TUP) b. Surat Perintah Bayar (SpBy) c. Surat Kuasa	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Surat Perintah Membayar (SPM) e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)				
4	KU04 KU0401	Pengelolaan Perbendaharaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0402	Pengembalian Belanja	Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0403	Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0404	Tuntutan Perbendaharaan a. Surat Pemberitahuan (gugatan) b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) c. Surat Penagihan d. Surat Keterangan Lunas	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	KU0405	Perhitungan <i>Ex-Officio</i> a. Surat Pemberitahuan (gugatan) b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) c. Surat Penagihan d. Surat Keterangan Lunas	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0406	Pembukaan Rekening Bendahara a. Surat permohonan pembukaan rekening bendahara satker b. Buku tabungan c. Rekening koran bila diperlukan d. Kartu Kredit Pemerintah (KKP)	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0407	Berita Acara Pemeriksaan Kas	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0408	Verifikasi Anggaran	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0409	Nota Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	KU0410	Pembukuan Anggaran a. Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) dan kartu-kartu realisasi anggaran DIPA dan kartu pengawasan realisasi anggaran. b. Buku Kas Pembantu (BKP) c. Kartu-kartu realisasi anggaran DIPA d. Kartu pengawasan realisasi anggaran	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0411	Pendampingan Perbendaharaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0412	Pembinaan Perbendaharaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
5	KU05 KU0501	Pelaporan Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara a. Berita Acara Pemeriksaan Kas	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan KPPN c. Daftar saldo rekening dan fotokopi rekening koran d. Laporan Realisasi bulanan SAI e. Laporan realisasi triwulan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) dari Unit Akuntansi Wilayah (UAW) dan gabungan semua UAW/Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi (UAKPI)				
	KU0502	Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) a. Daftar Transaksi (DT) b. Pengeluaran (PK) c. Penerimaan (PN) d. Dokumen Sumber (DS) e. Bukti Jurnal (BJ) f. Surat Tanda Setor (STS) g. Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) h. Giro 5 atau Giro 8 (Giro 5/8)	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		i. SPM dalam daftar ringkasan pengembalian pendapatan dan potongan dari pengeluaran (SPDR)				
	KU0503	Pelaporan Keuangan a. Laporan realisasi anggaran (LRA) b. Neraca c. Laporan arus kas (LAK) d. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0504	Pelaporan Pajak	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0505	Pelaporan Piutang Negara	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
6	KU06 KU0601	Evaluasi Evaluasi Laporan Keuangan	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0602	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	KU0603	Evaluasi Pejabat Perbendaharaan	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0604	Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum (BLU)	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
7	KU07 KU0701	Ketatausahaan Keuangan Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0702	Keterangan Penghasilan	Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0703	Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	KU0704	Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak	Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>VI</b> 1	<b>OR</b> OR01 OR0101	<b>ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b> Organisasi Struktur Organisasi a. perencanaan organisasi  b. penyusunan organisasi  c. pengembangan organisasi  d. pengesahan organisasi  e. evaluasi organisasi	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	OR0102	Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
2	OR02 OR0201	Ketatalaksanaan Tata Laksana a. penyusunan proses bisnis b. review tata laksana c. pengesahan proses bisnis	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
	OR0202	Mekanisme Kerja a. Berkas SOP ( <i>Standar Operational Procedure</i> )  b. Berkas SMM (Sistem Manajemen Mutu)	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala  Biro Kepegawaian dan Ortala
3	OR03	Reformasi Birokrasi a. penyusunan rencana b. pelaksanaan c. evaluasi dan penilaian	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
4	OR04	Budaya Organisasi a. Perumusan budaya organisasi b. Penetapan nilai budaya	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Sosialisasi dan internalisasi nilai d. Evaluasi penerapan nilai budaya organisasi				
5	OR05 OR0501	Organisasi Non Kedinasan KORPRI	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretaris Dewan KORPRI
	OR0502	Dharma Wanita	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
	OR0503	Koperasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala
	OR0504	Kerukunan Pensiun Pekerjaan Umum (KPPU)	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>VII</b> 1	<b>PA</b> PA01 PA0101	<b>PENGELOLAAN DATA</b> Pengelolaan Data dan Informasi Data dan Informasi Administrasi a. Pengelolaan informasi dan data administrasi meliputi: 1) analisa dan validasi data 2) pengumpulan dan pengolahan data 3) pemutakhiran data geospasial dan statistik 4) penyajian informasi data	Terbatas  Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen informasi meliputi masalah perencanaan anggaran dan kerja sama luar negeri; kepegawaian, organisasi, dan tata laksana; keuangan; umum; hukum; pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan; komunikasi publik; serta pengawasan.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi
	PA0102	Data dan Informasi Sumber Daya Air a. Pengelolaan informasi dan data sumber daya air meliputi:  1) analisa dan validasi data  2) pengumpulan dan pengolahan data	Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<p>3) pemutakhiran data geospasial dan statistik</p> <p>4) penyajian informasi data</p> <p>b. Dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen informasi meliputi penatagunaan sumber daya air, pengembangan jaringan sumber daya air, sungai, pantai, irigasi, danau, embung, bendung, bendungan, air tanah, dan air baku.</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Pusat Data dan Teknologi Informasi</p> <p>Pusat Data dan Teknologi Informasi</p> <p>Pusat Data dan Teknologi Informasi</p>
	PA0103	<p>Data dan Informasi Bina Marga</p> <p>a. Pengelolaan informasi dan data bina marga meliputi:</p> <p>1) analisa dan validasi data</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Pusat Data dan Teknologi Informasi</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) pengumpulan dan pengolahan data	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi
		3) pemutakhiran data geospasial dan statistik	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi
		4) penyajian informasi data	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi
		b. Dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen informasi meliputi jaringan jalan, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan tol/bebas hambatan, dan jembatan.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi
	PA0104	Data dan Informasi Cipta Karya a. Pengelolaan informasi dan data cipta karya meliputi: 1) analisa dan validasi data	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) pengumpulan dan pengolahan data  3) pemutakhiran data geospasial dan statistik  4) penyajian informasi data  b. Dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen informasi meliputi kawasan permukiman, penataan bangunan, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan.	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi
	PA0105	Data dan Informasi Perumahan a. Pengelolaan informasi dan data perumahan meliputi: 1) analisa dan validasi data	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>2) pengumpulan dan pengolahan data</p> <p>3) pemutakhiran data geospasial dan statistik</p> <p>4) penyajian informasi data</p> <p>b. Dokumen yang berkaitan dengan serta sistem manajemen informasi meliputi penyediaan dan pembiayaan perumahan termasuk rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, lahan pembangunan perumahan.</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Pusat Data dan Teknologi Informasi</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PA0106	<p>Data dan Informasi Bina Konstruksi</p> <p>a. Pengelolaan informasi dan data bina konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) analisa dan validasi data</li> <li>2) pengumpulan dan pengolahan data</li> <li>3) pemutakhiran data geospasial dan statistik</li> <li>4) penyajian informasi data</li> </ol> <p>b. Dokumen yang berkaitan dengan serta sistem manajemen informasi meliputi rencana strategis, rencana antarsektor, rencana antarwilayah, dan keterpaduan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Pusat Data dan Teknologi Informasi</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PA0107	Data dan Informasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah a. Pengelolaan informasi dan data pengembangan infrastruktur wilayah meliputi: 1) analisa dan validasi data 2) pengumpulan dan pengolahan data 3) pemutakhiran data geospasial dan statistik 4) penyajian informasi data	   Terbatas  Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	   Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	   Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	   Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen informasi meliputi rencana strategis, rencana antarsektor, rencana antarwilayah, dan keterpaduan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi
	PA0108	Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan a. Pengelolaan informasi dan data penelitian dan pengembangan meliputi: 1) analisa dan validasi data 2) pengumpulan dan pengolahan data 3) pemutakhiran data geospasial dan statistik 4) penyajian informasi data	Terbatas  Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen informasi meliputi hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman, serta kebijakan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk cetak biru teknologi informasi dan komunikasi.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi
	PA0109	Data dan Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia a. Pengelolaan informasi dan data pengembangan sumber daya manusia meliputi: 1) analisa dan validasi data  2) pengumpulan dan pengolahan data	Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>3) pemutakhiran data geospasial dan statistik</p> <p>4) penyajian informasi data</p> <p>b. Dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen informasi meliputi program pendidikan dan pelatihan di bidang administrasi, sumber daya air, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman, jasa konstruksi, pengembangan wilayah serta jabatan fungsional.</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Pusat Data dan Teknologi Informasi</p> <p>Pusat Data dan Teknologi Informasi</p> <p>Pusat Data dan Teknologi Informasi</p>
	PA0110	<p>Data dan Informasi Pelelangan Elektronik (<i>E-Procurement</i>)</p> <p>a. Dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan data pelelangan secara elektronik meliputi:</p>				

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		1) analisa dan validasi data  2) pengumpulan dan pengolahan data  3) penyajian informasi data  b. Dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen informasi pelelangan secara elektronik	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi  Pusat Data dan Teknologi Informasi
2	PA02  PA0201	Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Infrastruktur Teknologi Informasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi
	PA0202	Sistem Informasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi
	PA0203	Pengelolaan <i>Website</i>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
VIII 1	PB PB01  PB0101	<p><b>PENGADAAN BARANG/JASA</b> Pengadaan Barang yang Dilakukan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa</p> <p>Melalui Pelelangan Umum</p> <p>a. Dokumen SK Tim Pokja</p> <p>b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)</p>	<p>Rahasia</p> <p>Rahasia</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro</p> <p>Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro</p>	<p>Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis</p> <p>Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis</p>

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia: 1) Pengumuman  2) Pendaftaran  3) Penjelasan pekerjaan  4) Pemasukan dan pembukaan penawaran	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		5) Evaluasi penawaran  6) Penetapan pengumuman pemenang dan  d. Dokumen Laporan Tim Pokja	Rahasia  Biasa/Umum/ Terbuka  Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PB0102	Melalui Pelelangan Terbatas a. Dokumen SK Tim Pokja  b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)  c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia: 1) Pengumuman	Rahasia  Rahasia  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) Pendaftaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		3) Penjelasan pekerjaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		4) Pemasukan pembukaan penawaran dan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		5) Evaluasi penawaran	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		6) Penetapan dan pengumuman pemenang	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		d. Dokumen Laporan Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
	PB0103	Melalui Pelelangan Sederhana a. Dokumen SK Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia:				
		1) Pengumuman	Biasa/Umum/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		2) Pendaftaran	Biasa/Umum/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		3) Penjelasan pekerjaan	Biasa/Umum/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		4) Pemasukan pembukaan dan penawaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		5) Evaluasi penawaran	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		6) Penetapan pengumuman pemenang dan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		d. Dokumen Laporan Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PB0104	Melalui Penunjukan Langsung a. Dokumen pelaksanaan pengadaan (evaluasi, penetapan, penunjukan penyedia barang/jasa, Surat Perintah Kerja/SPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/BASTP, dan Laporan Kegiatan) b. Dokumen SK Penunjukkan Langsung	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
	PB0105	Melalui Pengadaan Langsung a. Dokumen SK Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia:				
		1) Pengumuman	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		2) Pendaftaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		3) Penjelasan pekerjaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		4) Pemasukan dan pembukaan penawaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		5) Evaluasi penawaran  6) Penetapan pengumuman pemenang dan  d. Laporan Tim Pokja	Rahasia  Biasa/Umum/ Terbuka  Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PB0106	Melalui Kontes a. Dokumen SK Tim Pokja  b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)  c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia: 1) Pengumuman	Rahasia  Rahasia  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) Pendaftaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		3) Penjelasan pekerjaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		4) Pemasukan dan pembukaan penawaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		5) Evaluasi penawaran	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		6) Penetapan pengumuman pemenang dan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Laporan Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
2	PB02  PB0201	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa  Melalui Pelelangan Umum a. Dokumen SK Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)  c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia: 1) Pengumuman	Rahasia  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi  Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) Pendaftaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
		3) Penjelasan pekerjaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
		4) Pemasukan pembukaan penawaran dan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		5) Evaluasi penawaran	Rahasia	Pejabat Tinggi Madya	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
		6) Penetapan pengumuman pemenang dan	Biasa/Umum/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
		d. Laporan Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PB0202	Melalui Pelelangan Terbatas a. Dokumen SK Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
		b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<p>c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia:</p> <p>1) Pengumuman</p>	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
		<p>2) Pendaftaran</p>	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		3) Penjelasan pekerjaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
		4) Pemasukan pembukaan penawaran dan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
		5) Evaluasi penawaran	Rahasia	Pejabat Tinggi Madya	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		6) Penetapan dan pengumuman pemenang  d. Laporan Tim Pokja	Biasa/Umum/ Terbuka  Rahasia	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi  Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
	PB0203	Melalui Pemilihan Langsung a. Dokumen SK Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
		c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia: 1) Pengumuman	Biasa/Umum/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2) Pendaftaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
		3) Penjelasan pekerjaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
		4) Pemasukan pembukaan penawaran dan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		5) Evaluasi penawaran	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
		6) Penetapan pengumuman pemenang dan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
		d. Laporan Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi



NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PB0205	Melalui Pengadaan Langsung a. Dokumen SK Tim Pokja  b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)	Rahasia  Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi  Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi



<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		3) Penjelasan pekerjaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
		4) Pemasukan pembukaan penawaran dan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
		5) Evaluasi penawaran	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>6) Penetapan dan pengumuman pemenang</p> <p>d. Laporan Tim Pokja</p>	<p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Rahasia</p>	<p>Pejabat Administrator</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro</p>	<p>Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi</p> <p>Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
3	PB03  PB0301	Pengadaan Jasa Konsultasi yang dilakukan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Seleksi Umum a. Dokumen SK Tim Pokja  b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)	Rahasia  Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia: 1) Pengumuman  2) Pendaftaran  3) Penjelasan pekerjaan  4) Pemasukan dan pembukaan penawaran  5) Evaluasi penawaran	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas  Rahasia	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Tinggi Madya	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		6) Penetapan dan pengumuman pemenang  d. Laporan Tim Pokja	Biasa/Umum/ Terbuka  Rahasia	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
	PB0302	Melalui Seleksi Sederhana a. Dokumen SK Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia:				
		1) Pengumuman	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		2) Pendaftaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		3) Penjelasan pekerjaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		4) Pemasukan pembukaan penawaran dan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		5) Evaluasi penawaran	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		6) Penetapan pengumuman pemenang dan	Biasa/Umum/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		d. Laporan Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PB0303	Melalui Penunjukkan Langsung a. Dokumen pelaksanaan pengadaan (evaluasi, penetapan, penunjukan penyedia barang/jasa, Surat Perintah Kerja/SPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/BASTP, dan Laporan Kegiatan) b. Dokumen SK Penunjukkan Langsung	Rahasia  Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PB0304	Melalui Pengadaan Langsung a. Dokumen SK Tim Pokja  b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)  c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia: 1) Pengumuman	Rahasia  Rahasia  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) Pendaftaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		3) Penjelasan pekerjaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		4) Pemasukan dan pembukaan penawaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		5) Evaluasi penawaran	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		6) Penetapan dan pengumuman pemenang	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Laporan Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
	PB0305	Melalui Sayembara a. Dokumen SK Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia:				
		1) Pengumuman	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		2) Pendaftaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		3) Penjelasan pekerjaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		4) Pemasukan pembukaan dan penawaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		5) Evaluasi penawaran	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		6) Penetapan pengumuman pemenang dan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		d. Laporan Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
4	PB04  PB0401	Pengadaan Jasa Lainnya yang dilakukan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa  Melalui Pelelangan Umum a. Dokumen SK Tim Pokja          b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)	Rahasia          Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama          Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro          Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis          Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia: 1) Pengumuman  2) Pendaftaran  3) Penjelasan pekerjaan  4) Pemasukan dan pembukaan penawaran  5) Evaluasi penawaran	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas  Rahasia	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		6) Penetapan dan pengumuman pemenang  d. Laporan Tim Pokja	Biasa/Umum/ Terbuka  Rahasia	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis  Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
	PB0402	Melalui Pelelangan Sederhana a. Dokumen SK Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia:				
		1) Pengumuman	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		2) Pendaftaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		3) Penjelasan pekerjaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		4) Pemasukan dan pembukaan penawaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		5) Evaluasi penawaran	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		6) Penetapan pengumuman pemenang dan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		d. Laporan Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PB0403	<p>Melalui Penunjukkan Langsung</p> <p>a. Dokumen pelaksanaan pengadaan (evaluasi, penetapan, penunjukan penyedia barang/jasa, Surat Perintah Kerja/SPK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/BASTP, dan Laporan Kegiatan)</p> <p>b. Dokumen SK Penunjukkan Langsung</p>	<p>Rahasia</p> <p>Rahasia</p>	<p>Pejabat Tinggi Madya</p> <p>Pejabat Tinggi Madya</p>	<p>Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro</p> <p>Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro</p>	<p>Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis</p> <p>Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PB0404	Melalui Pengadaan Langsung a. Dokumen SK Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia: 1) Pengumuman	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) Pendaftaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		3) Penjelasan pekerjaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		4) Pemasukan dan pembukaan penawaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		5) Evaluasi penawaran	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		6) Penetapan dan pengumuman pemenang	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Dokumen Laporan Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
	PB0405	Melalui Sayembara a. Dokumen SK Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Standar Dokumen Pengadaan (SDP)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		c. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia:				
		1) Pengumuman	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		2) Pendaftaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		3) Penjelasan pekerjaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		4) Pemasukan dan pembukaan penawaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		5) Evaluasi penawaran	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		6) Penetapan pengumuman pemenang dan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis
		d. Dokumen Laporan Tim Pokja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
<p><b>IX</b> 1</p>	<p><b>PM</b> PM01 PM0101</p>	<p><b>PENANAMAN MODAL</b>                      Penanaman Modal Dalam Negeri                      Penanaman Modal Langsung  <i>(Direct Investment)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan penanaman modal</li> <li>b. Analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur PUPR</li> <li>c. Pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur PUPR</li> <li>d. Fasilitasi proyek potensial kerja sama pemerintah dan badan usaha</li> <li>e. Pelaksanaan transaksi pembiayaan infrastruktur                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana</li> </ul> </li> </ul>	<p>Rahasia</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro</p>	<p>Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, &amp; Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan</p>

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana</li> <li>- Penyusunan usulan jawaban sanggah</li> <li>- Pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur PUPR</li> <li>- Pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur</li> <li>f. Deregulasi penanaman modal dalam pengembangan iklim penanaman modal</li> <li>g. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemantauan dan pengawasan penanaman modal</li> </ul> </li> </ul>				

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) Pelaksanaan penyelesaian masalah dan sengketa  3) Pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran pembiayaan infrastruktur PUPR				

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PM0102	Penanaman Modal Tidak Langsung (Indirect Investment/Portofolio Investment) a. Perencanaan penanaman modal b. Analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur PUPR c. Pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur PUPR d. Fasilitasi proyek potensial kerja sama pemerintah dan badan usaha e. Pelaksanaan transaksi pembiayaan infrastruktur - Persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana - Penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan usulan jawaban sanggah</li> <li>- Pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur PUPR</li> <li>- Pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur</li> <li>f. Deregulasi penanaman modal dalam pengembangan iklim penanaman modal</li> <li>g. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemantauan dan pengawasan penanaman modal</li> <li>2) Pelaksanaan penyelesaian masalah dan sengketa</li> </ul> </li> </ul>				

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		3) Pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran pembiayaan infrastruktur PUPR				
2	PM02 PM0201	Penanaman Modal Luar Negeri Penanaman Modal Langsung ( <i>Direct Investment</i> ) a. Perencanaan penanaman modal b. Analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur PUPR c. Pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur PUPR d. Fasilitasi proyek potensial kerja sama pemerintah dan badan usaha e. Pelaksanaan transaksi pembiayaan infrastruktur	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana</li> <li>- Penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana</li> <li>- Penyusunan usulan jawaban sanggah</li> <li>- Pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur PUPR</li> <li>- Pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur</li> <li>f. Deregulasi penanaman modal dalam pengembangan iklim penanaman modal</li> </ul>				

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<p>g. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Pemantauan dan pengawasan penanaman modal</li><li>2) Pelaksanaan penyelesaian masalah dan sengketa</li><li>3) Pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran pembiayaan infrastruktur PUPR</li></ul>				

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PM0202	<p>Penanaman Modal Tidak Langsung (Indirect Investment/Portofolio Investment)</p> <p>a. Perencanaan penanaman modal</p> <p>b. Analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur PUPR</p> <p>c. Pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur PUPR</p> <p>d. Fasilitasi proyek potensial kerja sama pemerintah dan badan usaha</p> <p>e. Pelaksanaan transaksi pembiayaan infrastruktur</p> <p>- Persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana</p>	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana</li> <li>- Penyusunan usulan jawaban sanggah</li> <li>- Pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur PUPR</li> <li>- Pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur</li> <li>f. Deregulasi penanaman modal dalam pengembangan iklim penanaman modal</li> <li>g. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemantauan dan pengawasan penanaman modal</li> </ul> </li> </ul>				

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) Pelaksanaan penyelesaian masalah dan sengketa 3) Pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran pembiayaan infrastruktur PUPR				
<b>X</b> 1	<b>PR</b> PR01  PR0101	<b>PERENCANAAN</b> Penyusunan Rencana dan Program Penyusunan Rencana dan Program a. Dokumen usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya b. Program kerja tahunan Unit Kerja c. Program Kerja Tahunan Kementerian	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
	PR0102	Pokok-Pokok Strategi Pembangunan a. Dokumen penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).</p> <p>c. Dokumen penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).</p> <p>d. Dokumen penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA K/L).</p> <p>e. Dokumen penyusunan hasil Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS).</p> <p>f. Dokumen penyusunan rencana pembangunan khusus antara lain daerah terkena/terdampak bencana alam, daerah konflik, daerah perbatasan.</p>				

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PR0103	Penetapan Kinerja Tahunan a. Kontrak kinerja Pimpinan Tertinggi (Menteri)  b. Kontrak kinerja Pimpinan Unit Kerja	Rahasia  Terbatas	Pejabat Tinggi Madya  Pejabat Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN  Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
2	PR02 PR0201	Administrasi dan Fasilitasi Penganggaran Penyusunan Anggaran a. Ketetapan pagu indikatif/Pagu Sementara b. Ketetapan pagu definitif c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan revisinya	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Keuangan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PR0202	Sistem Penganggaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
	PR0203	Analisis Data Penganggaran	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
	PR0204	Fasilitasi Pendanaan Daerah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah
3	PR03 PR0301	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemantauan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
	PR0302	Evaluasi 1) evaluasi program unit kerja 2) evaluasi program kementerian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PR0303	<p>Pelaporan</p> <p>a. Laporan insidentil</p> <p>b. Laporan berkala:</p> <p>1) Laporan bulanan</p> <p>2) Laporan triwulan</p> <p>3) Laporan semester</p> <p>4) Laporan tahunan</p> <p>5) Laporan tahunan Kementerian</p> <p>c. Laporan Khusus atas pelaksanaan program prioritas, program strategis, program instruksi Menteri dan atau Presiden</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Biro Perencanaan Anggaran dan KLN</p> <p>Biro Perencanaan Anggaran dan KLN</p> <p>Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan</p>
	PR0304	<p>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)</p> <p>a. LAKIP unit kerja</p> <p>b. LAKIP Kementerian</p>	<p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pejabat Administrator</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Biro Perencanaan Anggaran dan KLN</p>

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
<p><b>XI</b></p> <p>1</p>	<p><b>PS</b></p> <p>PS01</p> <p>PS0101</p>	<p><b>PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK NEGARA (BMN)</b></p> <p>Pengadaan</p> <p>Pengadaan Aset Lancar</p> <p>a. Dokumen Penyusunan rencana umum pengadaan: identifikasi dan analisa kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka acuan kerja, pengumuman rencana umum pengadaan.</p> <p>b. Rencana Kebutuhan BMN</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Kepala Satuan Kerja</p> <p>Kepala Satuan Kerja</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Masing-masing Satuan Kerja</p> <p>Masing-masing Satuan Kerja</p>

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>c. Dokumen Pemilihan penyedia: kaji ulang pengadaan, menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis, menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS), menetapkan rancangan kontrak, menyusun dokumen pengadaan.</p> <p>d. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia:</p> <p>1) Pengumuman</p> <p>2) Pendaftaran</p> <p>3) Penjelasan pekerjaan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Kepala Satuan Kerja</p> <p>Kepala Satuan Kerja</p> <p>Kepala Satuan Kerja</p> <p>Kepala Satuan Kerja</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Masing-masing Satuan Kerja</p> <p>Masing-masing Satuan Kerja</p> <p>Masing-masing Satuan Kerja</p> <p>Masing-masing Satuan Kerja</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		4) Pemasukan pembukaan dan penawaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
		5) Evaluasi penawaran	Rahasia	Kepala Satuan Kerja	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Satuan Kerja
		6) Penetapan pengumuman pemenang dan	Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
		e. Dokumen pengadaan langsung dan penunjukan langsung	Rahasia	Kepala Satuan Kerja	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Satuan Kerja

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		f. Penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan kontrak: surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), kontrak, surat perintah mulai kerja (SPMK), laporan pelaksanaan, berita acara serah terima (BAST).	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	PS0102	Pengadaan Aset Tetap a. Penyusunan rencana umum pengadaan: identifikasi dan analisa kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka acuan kerja, pengumuman rencana umum pengadaan. b. Rencana Kebutuhan BMN	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja  Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja  Masing-masing Satuan Kerja

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>c. Pemilihan penyedia: kaji ulang pengadaan, menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis, menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS), menetapkan rancangan kontrak, menyusun dokumen pengadaan</p> <p>d. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia:</p> <p>1) Pengumuman</p> <p>2) Pendaftaran</p> <p>3) Penjelasan pekerjaan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Kepala Satuan Kerja</p> <p>Kepala Satuan Kerja</p> <p>Kepala Satuan Kerja</p> <p>Kepala Satuan Kerja</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Masing-masing Satuan Kerja</p> <p>Masing-masing Satuan Kerja</p> <p>Masing-masing Satuan Kerja</p> <p>Masing-masing Satuan Kerja</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		4) Pemasukan pembukaan penawaran dan	Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
		5) Evaluasi penawaran	Rahasia	Kepala Satuan Kerja	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Satuan Kerja
		6) Penetapan pengumuman pemenang dan	Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
		e. Pengadaan langsung dan penunjukan langsung	Rahasia	Kepala Satuan Kerja	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Satuan Kerja

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>f. Penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan kontrak: surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), kontrak, surat perintah mulai kerja (SPMK), laporan pelaksanaan, berita acara serah terima (BAST).</p> <p>g. Dokumen Pengembangan strategi pengadaan Umum (Barang dan Jasa, Pekerjaan Konstruksi)</p> <p>h. Dokumen Pengembangan strategi pengadaan Khusus (Kemitraan pemerintah dengan badan usaha, badan usaha dan keadaan khusus).</p>	<p>Terbatas</p> <p>Rahasia</p> <p>Rahasia</p>	<p>Kepala Satuan Kerja</p> <p>Kepala Satuan Kerja</p> <p>Kepala Satuan Kerja</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro</p> <p>Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro</p>	<p>Masing-masing Satuan Kerja</p> <p>Masing-masing Satuan Kerja</p> <p>Masing-masing Satuan Kerja</p>

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PS0103	<p>Pengadaan Aset Lainnya</p> <p>a. Penyusunan rencana umum pengadaan: identifikasi dan analisa kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka acuan kerja, pengumuman rencana umum pengadaan.</p> <p>b. Rencana Kebutuhan BMN</p> <p>c. Pemilihan penyedia: kaji ulang pengadaan, menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis, menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS), menetapkan rancangan kontrak, menyusun dokumen pengadaan.</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Kepala Satuan Kerja</p> <p>Kepala Satuan Kerja</p> <p>Kepala Satuan Kerja</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Masing-masing Satuan Kerja</p> <p>Masing-masing Satuan Kerja</p> <p>Masing-masing Satuan Kerja</p>

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Dokumen Pelaksanaan pemilihan penyedia: 1) Pengumuman  2) Pendaftaran  3) Penjelasan pekerjaan  4) Pemasukan dan pembukaan penawaran  5) Evaluasi penawaran	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Rahasia	Kepala Satuan Kerja  Kepala Satuan Kerja  Kepala Satuan Kerja  Kepala Satuan Kerja  Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Satuan Kerja  Masing-masing Satuan Kerja  Masing-masing Satuan Kerja  Masing-masing Satuan Kerja  Masing-masing Satuan Kerja

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		6) Penetapan dan pengumuman pemenang  e. Pengadaan langsung dan penunjukan langsung.	Kepala Satuan Kerja  Rahasia	Pejabat Administrator  Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Masing-masing Satuan Kerja  Masing-masing Satuan Kerja
2	PS02 PS0201	Penggunaan Penetapan Status Penggunaan	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	PS0202	Penggunaan Sementara oleh Pengguna Barang Lain, Pengalihan Status Penggunaan, dan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
3	PS03 PS0301	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pemanfaatan a. Sewa b. Kerja sama pemanfaatan c. Bangun serah/Bangun serah guna d. Kerja sama penyediaan infrastruktur f. Pinjam pakai	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	PS0302	Pemeliharaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	PS0303	Pemeriksaan Pemeriksaan pada Pemanfaatan dan Pemeliharaan	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
4	PS04 PS0401	Pemindahtanganan Penjualan	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	PS0402	Tukar Menukar	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PS0403	Hibah	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	PS0404	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
5	PS05  PS0501	Penghapusan, Pemusnahan, Pengawasan, dan Pengendalian BMN Penghapusan dan Pemusnahan	Biasa/Umum/ Terbuka	Kepala Satuan Kerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	PS0502	Pengawasan dan Pengendalian	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
6	PS06 PS0601	Penatausahaan Pembukuan	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja
	PS0602	Inventarisasi dan Penilaian Kembali (Revaluasi BMN)	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PS0603	Pelaporan a. Laporan Barang Kuasa Pengguna  b. Laporan Barang Pembantu Pengguna  c. Laporan Barang Pengguna	Terbatas  Terbatas  Terbatas	Kepala Satuan Kerja  Kepala Satuan Kerja  Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja  Biro Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal, masing-masing Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Badan  Biro Pengelolaan BMN

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Kepala Satuan Kerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Satuan Kerja, Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Pengelolaan BMN, Sekretariat Inspektorat Jenderal, masing-masing Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Badan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>X</b> 1	<b>PW</b> PW01 PW0101	<b>PENGAWASAN</b> Pemeriksaan (Audit) Pemeriksaan Administrasi Umum a. Rencana Pemeriksaan: 1) Rencana Strategis Pengawasan 2) Pemeriksaan Penilaian dan Pengujian b. Dokumen Pelaksanaan Pemeriksaan: 1) Surat Tugas 2) Surat Pemberitahuan 3) Pelaksanaan Pengawasan 4) Berita Acara Hasil Pemeriksaan 5) Laporan Pelaksanaan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Inspektorat Jenderal
	PW0102	Pemeriksaan Keuangan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Inspektorat Jenderal

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Rencana Pemeriksaan: 1) Rencana Strategis Pengawasan 2) Pemeriksaan Penilaian dan Pengujian b. Dokumen Pelaksanaan Pemeriksaan, seperti surat tugas, surat pemberitahuan, pelaksanaan pengawasan, berita acara hasil pemeriksaan dan laporan pelaksanaan. c. Laporan Akuntan				
	PW0103	Pemeriksaan Kinerja a. Rencana Pemeriksaan: 1) Rencana Strategis Pengawasan 2) Pemeriksaan Penilaian dan Pengujian b. Dokumen Pelaksanaan Pemeriksaan, seperti surat tugas, surat pemberitahuan, pelaksanaan pengawasan, berita acara hasil pemeriksaan dan laporan pelaksanaan.	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Inspektorat Jenderal

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PW0104	Pemeriksaan Khusus a. Rencana Pemeriksaan: 1) Rencana Strategis Pengawasan 2) Pemeriksaan Penilaian dan Pengujian b. Dokumen Pelaksanaan Pemeriksaan, seperti surat tugas, surat pemberitahuan, pelaksanaan pengawasan, berita acara hasil pemeriksaan dan laporan pelaksanaan.	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Inspektorat Jenderal
	PW0105	Reviu a. Dokumen pelaksanaan reviu	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Inspektorat Jenderal

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2	PW02 PW0201	<p>Pemantauan dan Evaluasi Laporan Hasil Audit (LHA)</p> <p>a. Berita Acara hasil laporan pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian PUPR semesteran dan tahunan baik yang disampaikan Kementerian PAN dan RB, BPKP, dan UKP4 serta tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI.</p> <p>b. Laporan Hasil Audit (LHA)</p> <p>c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)</p> <p>d. Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO)</p>	Rahasia	Pejabat Tinggi Madya	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Inspektorat Jenderal

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	PW0202	Tindak Lanjut Laporan/Hasil Audit 1) Laporan Hasil yang Memerlukan Tindak Lanjut 2) Laporan Hasil yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut 3) Laporan Auditor Independen yang Memerlukan Tindak Lanjut 4) Laporan Hasil Audit Investigasi yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan memerlukan tindak lanjut	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Inspektorat Jenderal
	PW0203	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Inspektorat Jenderal
	PW0204	Evaluasi a. Pelaksanaan evaluasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Inspektorat Jenderal

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Laporan Hasil Evaluasi	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Inspektorat Jenderal
	PW0205	Penerapan Sistem Peringatan Dini ( <i>Early Warning System</i> )	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Inspektorat Jenderal

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
3	PW03 PW0301	<p>Pengaduan</p> <p>Intenal</p> <p>a. Analisis dan evaluasi laporan hasil pengawasan dari pengaduan internal Kementerian.</p> <p>b. Dokumen penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari pengaduan internal Kementerian.</p>	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Inspektorat Jenderal
	PW0302	<p>Eksternal</p> <p>a. Analisis dan evaluasi laporan hasil pengawasan dari pengaduan eksternal Kementerian.</p> <p>b. Dokumen penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari pengaduan eksternal Kementerian.</p>	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Inspektorat Jenderal

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
4	PW04 PW0401	Kegiatan Pengawasan Lainnya Pendampingan Pengawasan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Inspektorat Jenderal
	PW0402	Bimbingan dan Konsultasi Pengawasan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Inspektorat Jenderal
	PW0403	Pengelolaan dan Pemaparan Hasil Pengawasan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Inspektorat Jenderal
	PW0404	Sosialisasi Pengawasan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Inspektorat Jenderal
<b>XIII</b> 1	<b>UM</b> UM01 UM0101	<b>UMUM</b> Ketatausahaan Peringatan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Bhakti PUPR a. SK Pembentukan Panitia;	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Surat Undangan; c. Daftar Hadir; d. Foto Kegiatan; dan e. Laporan Kegiatan.				
	UM0102	Rapat/Rapat Kerja/ Rapat Koordinasi/ Rapat Teknis/Konsultasi Regional a. Surat Undangan;  b. Daftar Hadir;  c. Foto Kegiatan;  d. Laporan Kegiatan; dan  e. Risalah rapat pimpinan Menteri	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas	Pejabat Pengawas  Pejabat Pengawas  Pejabat Pengawas  Pejabat Pengawas  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja  Masing-masing Unit Kerja  Masing-masing Unit Kerja  Masing-masing Unit Kerja  Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	UM0103	Administrasi Perjalanan Dinas a. Surat Undangan; b. Surat Izin Pelayanan Visa/Exit Permit/ Paspors; c. Surat Izin ke Luar Negeri;	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum dan Biro Perencanaan Kerja Sama & Luar Negeri
		d. SK Pelaksanaan Kegiatan; e. Foto Kegiatan; f. Laporan Kegiatan;				
	UM0104	Tanda Penghargaan/ Kenang-kenangan/ Hadiah a. Berkas pelaksanaan kegiatan hingga laporan pelaksanaan kegiatan. b. Hasil penilaian. c. Penetapan pemenang.	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian & Organisasi Tata Laksana
	UM0105	Jam Kerja a. Surat Pemberitahuan Jam Kerja	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum
		b. Daftar Hadir/Absensi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian & Organisasi Tata Laksana

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2	UM02 UM0201	Kearsipan Penciptaan Arsip a. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar b. Kartu Kendali c. Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi d. Distribusi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum
	UM0202	Pengelolaan Arsip a. Pemberkasan  b. Penataan Arsip  c. Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip 1) Daftar arsip 2) Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi) 3) Daftar pencarian arsip 4) Daftar Arsip Informasi Publik 5) Daftar Arsip Vital/Aset	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum  Biro Umum  Biro Umum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Alih Media 1) Administrasi pelaksanaan alih media 2) Daftar rekapitulasi arsip yang dialihmediakan e. Layanan Arsip f. Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas	Pejabat Pengawas  Pejabat Pengawas  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum  Biro Umum  Biro Umum
	UM0203	Penyusutan Arsip a. Pemandahan Arsip Inaktif 1) Berita Acara Pemandahan 2) Daftar arsip yang di pindahkan b. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna 1) Berita Acara Pemusnahan Arsip	Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum  Biro Umum

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2) Daftar arsip yang dimusnahkan 3) Pertimbangan Tim Penilai 4) SK Pemusnahan c. Penyerahan arsip statis 1) Berita Acara Penyerahan Arsip 2) Daftar arsip yang diserahkan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum
	UM0204	Pembinaan a. Penyusunan dan Pengembangan Pedoman dan/atau Sistem Kearsipan 1) Berkas administrasi penyusunan dan pengembangan pedoman dan/atau sistem kearsipan meliputi: rencana kerja, pembentukan tim kerja dan surat-menyerurat.	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2) Berkas pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pedoman dan/atau sistem kearsipan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TOR/proposal</li> <li>- Tinjauan/review literatur</li> <li>- <i>Questioner</i> dan daftar wawancara, statistik atau tabel hasil penelitian</li> <li>- Laporan survei/pengumpulan data</li> <li>- Laporan hasil analisis penelitian</li> <li>- Materi dan laporan ekspose</li> <li>- Bahan penelitian/draf hasil penyusunan dan pengembangan</li> <li>- Laporan hasil penyusunan dan pengembangan</li> </ul>				

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Bimbingan Teknis dan Konsultasi; c. Sosialisasi Kearsipan d. Lomba Tertib Arsip e. Forum Arsiparis f. Supervisi dan Monitoring				
3	UM03 UM0301	Kerumahtanggaan Penggunaan Sarana dan Prasarana Kantor a. Administrasi penggunaan gedung, auditorium/aula, ruang rapat, rumah dinas, wisma, taman dan landscaping; b. Penggunaan kendaraan dinas operasional (KDO) <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengurusan surat-surat kendaraan dinas;</li> <li>2) pemeliharaan dan perbaikan;</li> <li>3) pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan.</li> </ol>	Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas	Pejabat Pengawas  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum  Biro Umum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	UM0302	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor a. Administrasi surat menyurat pemeliharaan gedung, auditorium/ aula, ruang rapat, rumah dinas, wisma, taman dan landscaping; b. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional (KDO) 1) pengurusan surat-surat kendaraan dinas; 2) kuitansi pemeliharaan / perbaikan kendaraan dinas;	Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas	Pejabat Pengawas  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum  Biro Umum
	UM0303	Jaringan Listrik, Air, dan Telepon	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
4	UM04 UM0401	Ketertiban dan Keamanan Pengamanan dan Pengawasan a. Pengawasan dan pengamanan gedung kantor, proyek pembangunan/ perbaikan, Rumah Jabatan (Rumah Menteri dan Pejabat Eselon I): 1) Daftar nama satuan pengamanan 2) Daftar jaga/ daftar piket 3) Catatan gangguan/ pelanggaran/ kejadian 4) Surat izin keluar masuk orang atau barang	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum
	UM0402	Izin Pemindahan (Keluar Masuk) Barang	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum
	UM0403	Kehilangan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	UM0404	Kerusakan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum
	UM0405	Kecelakaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum
	UM0406	Perparkiran	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum
	UM0407	Seragam/Pakaian Dinas	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum
5	UM05 UM0501	Pelayanan Kesehatan Poliklinik a. Formulir pendaftaran	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Kartu Pasien  c. Kartu Rekam Medis	Terbatas  Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Umum  Biro Umum
	UM0502	Perpustakaan a. Pengadaan Bahan Pustaka  1) Pembelian 2) Hibah 3) Hadiah 4) Tukar Menukar  b. Penyajian Bahan Pustaka 1) Formulir pengisian peminjaman 2) Surat peringatan 3) Pengambilan bahan pustaka	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Komunikasi Publik

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	UM0503	Tempat Penitipan Anak a. Formulir pengisian data  b. Data administratif: 1) SK Pegawai 2) Fotocopy KTP para orang tua 3) Akte Kelahiran Anak 4) Pas Foto Anak 5) Fotocopy Kartu Keluarga	Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Umum  Biro Umum
	UM0504	Rumah Pintar	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum
	UM0505	Koperasi a. Buku Daftar Anggota	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Buku Daftar Pengurus	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum
		c. Buku Simpanan Anggota	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum
6	UM06 UM0601	Keprotokolan Upacara/Acara Kedinasan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum
	UM0602	Kunjungan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan
	UM0603	Agenda Pimpinan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Unit Kerja
7	UM07 UM0701	Kegiatan Sosial Kegiatan Kerohanian	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	UM0702	Kegiatan Olah Raga	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum
	UM0703	Kegiatan Kesenian	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum
	UM0704	Sumbangan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Umum

**B. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Substantif**

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I</b> 1	<b>SA</b> SA01	<b>SUMBER DAYA AIR</b> Perumusan Kebijakan Dan Strategi Sumber Daya Air a. Proses penyusunan perumusan kebijakan 1) Penyiapan rancangan kebijakan dan strategi 2) Final draft kebijakan dan strategi 3) Harmonisasi kebijakan dan strategi 4) Hasil kebijakan dan strategi bidang SDA b. Sosialisasi kebijakan dan strategi sumber daya air	Terbatas          Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama          Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja          Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air          Dit. Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
2	SA02 SA0201	Penatagunaan Sumber Daya Air Perencanaan Wilayah Sungai a. Penetapan sumber daya air wilayah sungai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Pola dan rencana pengelolaan sungai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
		c. Pra studi kelayakan sumber daya air	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
		d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan wilayah sungai	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
	SA0202	Kelembagaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan
	SA0203	Pemanfaatan Sumber Daya Air				
		a. Rekomendasi, perizinan penggunaan dan pengusaha pemanfaatan sumber daya air	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Hasil perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air berupa Survei Investigation Design (SID) c. Studi kelayakan pemerintah dengan badan usaha d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pemanfaatan sumber daya air	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan  Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan  Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan
	SA0204	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air a. Strategi penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim b. Sistem hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air c. Kajian lingkungan lingkungan strategis sumber daya air dan isu-isu global terkait	Terbatas  Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air  Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air  Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi hidrologi dan lingkungan sumber daya air	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air
	SA0205	Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Bidang Sumber Daya Air	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan
3	SA03  SA0301	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air  Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air a. Pengembangan pengelolaan sumber daya air  b. Program pengelolaan sumber daya air  c. Prioritas pengelolaan sumber daya air	  Terbatas  Terbatas  Terbatas	  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	  Dit. Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air  Dit. Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air  Dit. Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan pengelolaan sumber daya air	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
	SA0302	Manajemen Mutu a. Penyelenggaraan manajemen mutu b. Pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi manajemen mutu	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kepatuhan Intern
			Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kepatuhan Intern
			Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kepatuhan Intern
4	SA04 SA0401	Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan Sungai Dan Pantai a. Perencanaan teknis pengelolaan sungai dan pantai 1) MC-100 (Mutual Check 100) 2) dokumen detail desain (Document Engineering Design/DED)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sungai dan Pantai

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Inventarisasi bahaya pada sungai dan pantai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sungai dan Pantai
		c. Pengendalian konstruksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sungai dan Pantai
		d. Pengelolaan drainase utama perkotaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sungai dan Pantai
		e. Konservasi fisik sungai dan pantai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sungai dan Pantai
		f. Penyelenggaraan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pengelolaan sungai dan pantai	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air
		g. Penyelesaian pekerjaan pengelolaan sungai dan pantai 1) As Built Drawing 2) PHO/FHO (Provisional Hand Over/Final Hand Over)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sungai dan Pantai
		h. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan sungai dan pantai	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sungai dan Pantai

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	SA0402	<p>Pengelolaan Irigasi Dan Rawa</p> <p>a. Perencanaan teknis pengelolaan irigasi dan rawa</p> <p>1) MC-100 (Mutual Check 100)</p> <p>2) dokumen detail desain (Document Engineering Design/DED)</p> <p>b. Inventarisasi bahaya pada irigasi dan rawa</p> <p>c. Pengendalian konstruksi</p> <p>d. Konservasi fisik irigasi dan rawa</p> <p>e. Penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pengelolaan irigasi dan rawa</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Irigasi dan Rawa</p> <p>Dit. Irigasi dan Rawa</p> <p>Dit. Irigasi dan Rawa</p> <p>Dit. Irigasi dan Rawa</p> <p>Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air</p>

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		f. Penyelesaian pekerjaan pengelolaan irigasi dan rawa 1) As Built Drawing 2) PHO/FHO (Provisional Hand Over/Final Hand Over)  i. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan irigasi dan rawa	Terbatas          Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama          Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja          Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Irigasi dan Rawa          Dit. Irigasi dan Rawa
	SA0403	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, Dan Embung a. Penyusunan teknis perencanaan pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung 1) MC-100 (Mutual Check 100) 2) dokumen detail desain (Document Engineering Design/DED)  b. Penilaian kesiapan pelaksanaan bendungan, danau, situ dan embung dan konservasi fisik sumber daya air	Terbatas          Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama          Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja          Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bendungan dan Danau          Dit. Bendungan dan Danau

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>c. Koordinasi dengan instansi terkait dan pihak pemilik bendungan</p> <p>d. Inventarisasi, registrasi dan klasifikasi bahaya pada bendungan, danau, situ, dan embung</p> <p>e. Penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung</p> <p>f. Penyelesaian pekerjaan bendungan, danau, situ, dan embung</p> <p>1) As Built Drawing</p> <p>2) PHO/FHO (Provisional Hand Over/Final Hand Over)</p> <p>h. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Bendungan dan Danau</p> <p>Dit. Bendungan dan Danau</p> <p>Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air</p> <p>Dit. Bendungan dan Danau</p> <p>Dit. Bendungan dan Danau</p>

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	SA0404	<p>Pengelolaan Air Tanah Dan Air Baku</p> <p>a. Perencanaan teknis pengelolaan air tanah dan air baku</p> <p>1) MC-100 (Mutual Check 100)</p> <p>2) dokumen detail desain (Document Engineering Design/DED)</p> <p>b. Penilaian kesiapan pelaksanaan air tanah dan air baku dan konservasi fisik sumber daya air</p> <p>c. Pengendalian konstruksi</p> <p>d. Konservasi fisik air tanah dan air baku</p> <p>e. Penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pengelolaan air tanah dan air baku</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Air Tanah dan Air Baku</p> <p>Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		f. Penyelesaian pekerjaan pengelolaan air tanah dan air baku  1) As Built Drawing 2) PHO/FHO (Provisional Hand Over/Final Hand Over)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Air Tanah dan Air Baku
5	SA05  SA0501	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Operasi dan Pemeliharaan Sungai Dan Pantai a. Pengelolaan operasi dan pemeliharaan pada sungai dan pantai b. Penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana c. Pemberdayaan masyarakat d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan  Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan  Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan  Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	SA0502	Operasi Dan Pemeliharaan Irigasi Dan Rawa a. Pengelolaan operasi dan pemeliharaan pada irigasi dan rawa b. Penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana c. Pemberdayaan masyarakat d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan  Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan  Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan  Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan
	SA0503	Operasi Dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, Dan Embung a. Pengelolaan operasi dan pemeliharaan pada bendungan, danau, situ, dan embung b. Penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan  Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Pemberdayaan masyarakat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan
		d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan
	SA0504	Operasi Dan Pemeliharaan Air Tanah Dan Air Baku				
		a. Pengelolaan operasi dan pemeliharaan pada air tanah dan air baku	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan
		b. Penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan
		c. Pemberdayaan masyarakat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan
		d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6	SA06 SA0601	Pengendalian Lumpur Sidoarjo				
		Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo				
		a. Penyusunan rencana umum pengendalian lumpur Sidoarjo	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
		b. Penyusunan rencana teknik pengendalian lumpur Sidoarjo	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
		c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan pengendalian Lumpur Sidoarjo	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	SA0602	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	SA0603	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo				
		a. Pembangunan tanggul lumpur Sidoarjo	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Pembangunan drainase dan penataan lingkungan  c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengendalian Lumpur Sidoarjo	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo  Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	SA0604	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Akibat Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
7	SA07	Pemantauan Dan Evaluasi a. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dan strategi sumber daya air  b. Pemantauan dan evaluasi penatagunaan sumber daya air	Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air  Dit. Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan, dan Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan jaringan sumber daya air  d. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air  e. Hasil audit konstruksi	Terbatas  Terbatas  Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Dit. Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dit. Kepatuhan Intern  Di. Sungai dan Pantai, Dit. Irigasi dan Rawa, Dit. Bendungan dan Danau, Dit. Air Tanah dan Air Baku  Dit. Keberlanjutan Konstruksi

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		f. Audit Teknis operasi dan pemeliharaan sumber daya air  g. Pemantauan dan evaluasi pengendalian Lumpur Sidoarjo	Rahasia  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan  Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
II 1	BM BM01	<b>BINA MARGA</b> Perumusan Kebijakan Bina Marga a. Proses penyusunan kebijakan dan strategi bina marga 1) Penyiapan rancangan kebijakan dan strategi 2) Final draft kebijakan dan strategi 3) Proses harmonisasi kebijakan dan strategi 4) Hasil kebijakan dan strategi bina marga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Sosialisasi kebijakan dan strategi bina marga	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	BM0202	Sistem Jaringan Jalan a. Penetapan fungsi, status, dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan nasional 1) jalan nasional 2) jalan provinsi 3) jalan arteri kolektor b. Pelaksanaan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi 1) Berkas usulan status jalan dari provinsi 2) Proses penetapan status jalan c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi sistem jaringan jalan	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan  Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan  Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan



NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		3) Standar pelaksanaan pembangunan yang berkeselamatan 4) Kriteria penetapan laik fungsi jalan nasional  b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi penerapan standar dan pedoman pembangunan jalan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pembangunan Jalan
	BM0302	Manajemen Konstruksi a. Rencana pengendalian manajemen pelaksanaan konstruksi jalan nasional yang bersumber APBN dan kerjasama luar negeri  b. Rencana teknis manajemen konstruksi 1) <i>Engineering Estimate</i> 2) Dokumen lingkungan: analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas 3) <i>Survey Quarry</i> 4) Laporan Topografi 5) Laporan Hidrologi 6) Laporan Geoteknik	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pembangunan Jalan
			Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pembangunan Jalan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		7) Dokumen detail desain <i>(Document Engineering Design/DED)</i>  c. Pengendalian analisis dampak lingkungan  d. Pengendalian analisis dampak lalu lintas  e. Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi  f. Analisis dan tindaklanjut atas temuan teknis konstruksi jalan  g. Koordinasi dan pengendalian pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas jalan	Terbatas  Terbatas  Terbatas  Rahasia  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pembangunan Jalan  Dit. Pembangunan Jalan  Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan  Dit. Pembangunan Jalan  Dit. Pembangunan Jalan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		h. Penetapan leger jalan nasional  i. Penyelesaian pekerjaan konstruksi jalan 1) As Built Drawing 2) PHO/FHO (Provisional Hand Over/Final Hand Over)  j. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi manajemen konstruksi jalan	Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Masing-masing Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  Dit. Pembangunan Jalan  Dit. Pembangunan Jalan
	BM0303	Pengelolaan Geometrik, Perkerasan, dan Drainase a. Penyusunan rencana teknis pengelolaan geometrik, perkerasan, dan drainase 1) <i>Engineering Estimate</i> 2) Laporan Lingkungan 3) <i>Survey Quarry</i> 4) Laporan Topografi 5) Laporan Hidrologi 6) Laporan Geoteknik	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		7) Dokumen detail desain ( <i>Document Engineering Design/DED</i> ) 8) <i>Value Engineering/VE</i> 9) Data Lalu Lintas				
		b. Teknis konstruksi perkerasan dan drainase jalan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
		c. Pelaksanaan perbaikan jalan bermasalah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
		d. <i>Masterplan</i> jalan dan drainase jalan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
		e. Pengembangan pelaksanaan teknologi bahan perkerasan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
		f. Penyelesaian pekerjaan pengelolaan geometrik, perkerasan, dan drainase 1) <i>As Built Drawing</i> 2) PHO/FHO ( <i>Provisional Hand Over/Final Hand Over</i> )	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		g. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan geometrik, perkerasan, dan drainase	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
	BM0304	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng a. Penyusunan rencana teknis pengelolaan geoteknik dan manajemen lereng 1) <i>Engineering Estimate</i> 2) Laporan Lingkungan 3) <i>Survey Quarry</i> 4) Laporan Topografi 5) Laporan Hidrologi 6) Laporan Geoteknik 7) Dokumen detail desain ( <i>Document Engineering Design/DED</i> ) b. Pengembangan dan penerapan teknologi tanah 1) Pengembangan teknologi tanah 2) Penerapan teknologi tanah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
			Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
			Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>c. Fasilitasi konsultasi teknis geoteknik dan mitigasi daerah rawan gempa, patahan, dan manajemen lereng</p> <p>d. Pembinaan teknis perencanaan mitigasi daerah rawan gempa, patahan dan manajemen lereng</p> <p>e. Mitigasi daerah rawan gempa, rawan longsor, patahan dan manajemen lereng, dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan</p> <p>f. Penyelesaian pekerjaan pengelolaan geoteknik dan manajemen lereng                      1) <i>As Built Drawing</i>                      2) <i>PHO/FHO (Provisional Hand Over/Final Hand Over)</i></p> <p>g. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan geoteknik dan manajemen lereng</p>	<p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pejabat Administrator</p> <p>Pejabat Administrator</p> <p>Pejabat Administrator</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan</p>



NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	BM0402	<p>Perencanaan Teknis</p> <p>a. Penyusunan rencana teknis preservasi jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Engineering Estimate</i></li> <li>2) Laporan Lingkungan</li> <li>3) <i>Survey Quarry</i></li> <li>4) Laporan Topografi</li> <li>5) Laporan Hidrologi</li> <li>6) Laporan Geoteknik</li> <li>7) Dokumen detail desain (<i>Document Engineering Design/DED</i>)</li> </ol> <p>b. Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan</p> <p>c. Pemeliharaan dan pemanfaatan bahan dan peralatan jalan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II</p> <p>Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II</p> <p>Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II</p>

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Pengendalian mitigasi bencana alam  e. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknis preservasi jalan	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II  Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II
	BM0403	Teknik Rekonstruksi a. Konsultasi perencanaan rekonstruksi jalan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Pengendalian teknis perencanaan rekonstruksi jalan  c. Penerapan teknologi bahan perkerasan  d. Pengendalian konstruksi jalan nasional	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II  Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II  Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Penyelesaian pekerjaan teknik konstruksi  e. Penyelesaian pekerjaan teknik konstruksi 1) <i>As Built Drawing</i> 2) <i>PHO/FHO (Provisional Hand Over/Final Hand Over)</i>  f. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi teknik rekonstruksi jalan	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II  Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II  Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Penyediaan konsultasi perencanaan pemeliharaan jalan  b. Pengendalian teknis pemeliharaan jalan  c. Penyusunan rencana teknis pemeliharaan jalan 1) <i>Engineering Estimate</i> 2) Laporan Lingkungan 3) <i>Survey Quarry</i> 4) Laporan Topografi 5) Laporan Hidrologi 6) Laporan Geoteknik 7) Dokumen detail desain ( <i>Document Engineering Design/DED</i> )	Terbatas  Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II  Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II  Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Pengembangan teknis perencanaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II
		e. Penerapan teknologi bahan perkerasan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II
		f. Penyelesaian pekerjaan teknik pemeliharaan jalan 1) As Built Drawing 2) PHO/FHO ( <i>Provisional Hand Over/Final Hand Over</i> )	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II



NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi penerapan standar dan pedoman pengelolaan jembatan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pembangunan Jembatan
	BM0502	Perencanaan Teknis a. Penyusunan rencana teknis 1) <i>Engineering Estimate</i> 2) Laporan Lingkungan 3) <i>Survey Quarry</i> 4) Laporan Topografi 5) Laporan Hidrologi 6) Laporan Geoteknik 7) Dokumen detail desain ( <i>Document Engineering Design/DED</i> ) b. Pengujian mutu konstruksi c. Pengembangan metode survey inventarisasi, survey rutin, survey detail dan survey khusus jembatan d. Pengumpulan dan evaluasi biaya penanganan jembatan	Terbatas          Terbatas          Terbatas          Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama          Pimpinan Tinggi Pratama          Pimpinan Tinggi Pratama          Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja          Memiliki dampak yang mengganggu kinerja          Memiliki dampak yang mengganggu kinerja          Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pembangunan Jembatan          Dit. Pembangunan Jembatan          Dit. Pembangunan Jembatan          Dit. Pembangunan Jembatan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pembangunan dan preservasi jembatan  f. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknis pengelolaan jembatan	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pembangunan Jembatan  Dit. Pembangunan Jembatan
	BM0503	Teknik Jembatan a. Rencana teknis jembatan 1) <i>Engineering Estimate</i> 2) Laporan Lingkungan 3) <i>Survey Quarry</i> 4) Laporan Topografi 5) Laporan Hidrologi 6) Laporan Geoteknik 7) Dokumen detail desain ( <i>Document Engineering Design/DED</i> ) 8) Kriteria Desain	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pembangunan Jembatan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Rekomendasi teknik perencanaan teknik bangunan dan preservasi bangunan atas, bangunan pelengkap, bangunan bawah, pondasi dan daerah aliran sungai (DAS) jembatan  c. Berita Acara Penetapan Laik Fungsi Jembatan  d. Penyelesaian pekerjaan teknik jembatan 1) As Built Drawing 2) PHO/FHO ( <i>Provisional Hand Over/Final Hand Over</i> )  e. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi teknik jembatan	Terbatas  Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pembangunan Jembatan  Dit. Pembangunan Jembatan  Dit. Pembangunan Jembatan  Dit. Pembangunan Jembatan
	BM0504	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus a. Rekomendasi teknik pada teknik terowongan dan jembatan khusus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Dokumen penggunaan (khusus) dan laik fungsi terowongan, <i>underpass</i> , jembatan bentang panjang dan <i>fly over</i>  c. Standar dokumen spesifikasi khusus terowongan, <i>underpass</i> , jembatan bentang panjang dan <i>fly over</i>  d. Rencana teknis terowongan dan jembatan khusus 1) <i>Engineering Estimate</i> 2) Laporan Lingkungan 3) <i>Survey Quarry</i> 4) Laporan Topografi 5) Laporan Hidrologi 6) Laporan Geoteknik 7) Dokumen detail desain ( <i>Document Engineering Design/DED</i> ) 8) Kriteria Desain	Terbatas   Terbatas   Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama   Pimpinan Tinggi Pratama   Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan   Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan   Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		e. Pengembangan perencanaan teknik dan pembangunan terowongan, underpass, jembatan bentang panjang dan fly over berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan jembatan dan terowongan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
		f. Pengembangan preservasi terowongan, underpass, jembatan bentang panjang dan fly over berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan jembatan dan terowongan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
		g. Dokumen analisa perilaku jembatan khusus dan terowongan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
		h. Inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi bahaya jembatan khusus dan terowongan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
		i. Penyelesaian pekerjaan terowongan dan jembatan khusus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1) As Built Drawing 2) PHO/FHO ( <i>Provisional Hand Over/Final Hand Over</i> )  j. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi teknik terowongan dan jembatan khusus	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
6	BM06  BM0601	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah  Bimbingan Teknik Jalan Daerah a. Konektivitas jaringan jalan pusat dan daerah  b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi teknik jalan daerah	Biasa/Umum/ Terbuka   Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator   Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan   Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	BM0602	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar a. Dokumen perencanaan pengembangan jalan metropolitan b. Teknik pelaksanaan pembangunan jalan metropolitan dan kota besar serta perkotaan c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengembangan jalan metropolitan dan kota besar	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan  Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan  Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	BM0603	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan a. Perencanaan teknis jalan tol dengan biaya APBN/dengan dukungan pemerintah b. Pengembangan jaringan jalan tol terintegrasi jalan nasional	Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Jalan Bebas Hambatan  Dit. Jalan Bebas Hambatan



NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- gagal dalam melaksanakan konsesi f. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengadaan investasi jalan tol	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Jalan Bebas Hambatan
	BM0702	Teknik Pengaturan Jalan Tol a. Rencana teknik pengaturan jalan tol 1) <i>Engineering Estimate</i> 2) Laporan Lingkungan 3) <i>Survey Quarry</i> 4) Laporan Topografi 5) Laporan Hidrologi 6) Laporan Geoteknik 7) Dokumen detail desain ( <i>Document Engineering Design/DED</i> ) 8) Evaluasi Rencana Teknik Akhir (RTA) b. Analisa kelayakan finansial c. Studi kelayakan jalan tol	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Jalan Bebas Hambatan
			Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Jalan Bebas Hambatan
			Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Jalan Bebas Hambatan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Analisis dampak lingkungan e. Pembangunan jalan tol f. Perekaman data lalu lintas dan pendapatan tol g. Penyelesaian pekerjaan pengaturan jalan tol 1) <i>As Built Drawing</i> 2) <i>PHO/FHO (Provisional Hand Over/Final Hand Over)</i> h. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi teknik pengaturan jalan tol	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama Pimpinan Tinggi Pratama Pimpinan Tinggi Pratama Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Jalan Bebas Hambatan Dit. Jalan Bebas Hambatan Dit. Jalan Bebas Hambatan Dit. Jalan Bebas Hambatan Dit. Jalan Bebas Hambatan
8	BM08	Pemantauan dan Evaluasi a. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dan strategi bina marga	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Pemantauan dan evaluasi pengembangan jaringan jalan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
		c. Pemantauan dan evaluasi pembangunan jalan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pembangunan Jalan
		d. Pemantauan dan evaluasi preservasi Jalan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II
		e. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan jembatan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pembangunan Jembatan
		f. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan jalan bebas hambatan, perkotaan, dan fasilitasi jalan daerah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		g. Audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Dit. Pembangunan Jalan
		h. Audit keselamatan jembatan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Dit. Pembangunan Jembatan
		i. Pemantauan dan evaluasi pengaturan jalan tol	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Jalan Bebas Hambatan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	<b>CK</b> CK01	<b>CIPTA KARYA</b> Perumusan Kebijakan Cipta Karya a. Proses penyusunan kebijakan dan strategi cipta karya 1) Penyiapan rancangan kebijakan dan strategi cipta karya 2) Final draft kebijakan dan strategi cipta karya 3) Proses harmonisasi kebijakan dan strategi cipta karya 4) Hasil kebijakan dan strategi cipta karya b. Sosialisasi kebijakan dan strategi cipta karya	Terbatas          Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama       Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja          Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman          Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman



NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	CK0202	<p>Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan</p> <p>a. Penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan</p> <p>b. Fasilitasi program keterpaduan pembiayaan anggaran tahunan</p> <p>c. Fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya, seperti pinjaman dana dari luar negeri (loan)</p> <p>d. Fasilitasi pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman</p> <p>e. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi keterpaduan pembiayaan dan pelaksanaan infrastruktur permukiman</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
3	CK03  CK0301	Pengembangan Kawasan Permukiman  Perencanaan Teknis a. Perencanaan teknis dan analisa teknis penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, perdesaan, dan permukiman khusus  b. Pelaksanaan kebijakan kawasan perkotaan dan perdesaan  c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman pada kawasan permukiman khusus meliputi kawasan perbatasan, rawan bencana, pulau-pulau terluar, pasca bencana  d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknis pengembangan kawasan permukiman	Terbatas     Terbatas     Terbatas     Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama     Pimpinan Tinggi Pratama     Pimpinan Tinggi Pratama     Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja     Memiliki dampak yang mengganggu kinerja     Memiliki dampak yang mengganggu kinerja     Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman     Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman     Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman     Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	CK0302	Kawasan Permukiman Perkotaan a. Pembangunan permukiman perkotaan b. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset c. Pengembangan jejaring kemitraan d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi kawasan permukiman perkotaan	Terbatas  Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman  Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman  Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman  Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman
	CK0303	Kawasan Permukiman Perdesaan a. Pelaksanaan kebijakan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
		c. Pengembangan jejaring kemitraan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman
		d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi kawasan permukiman perdesaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman
	CK0304	Kawasan Permukiman Khusus				
		a. Pelaksanaan kebijakan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman
		b. Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman
		c. Inovasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman khusus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman
		e. Pengembangan jejaring kemitraan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman
		f. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi kawasan permukiman khusus	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman
	CK0305	Kelembagaan a. Fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan permukiman perkotaan, perdesaan, dan khusus b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi kembangan pengembangan kawasan permukiman	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman  Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	CK04 CK0401	Pembinaan Penataan Banguna Perencanaan Teknis a. Rencana dan analisa teknis  b. Jejaring kemitraan bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya  c. Rehabilitasi dan/atau revitalisasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar  1) Review Desain Gedung Sekolah, Gedung Olahraga, dan Pasar  2) <i>Review Prototype</i>	Terbatas  Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Penataan Bangunan  Dit. Bina Penataan Bangunan  Dit. Bina Penataan Bangunan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknis pembinaan penataan bangunan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Penataan Bangunan
	CK0402	Penataan Bangunan Gedung a. Pemeriksaan keandalan bangunan gedung b. Pengembangan jaringan kemitraan c. Fasilitasi pembangunan gedung istana kepresidenan d. Rekomendasi pengembangan bangunan gedung negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Penataan Bangunan
		b. Pengembangan jaringan kemitraan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Penataan Bangunan
		c. Fasilitasi pembangunan gedung istana kepresidenan	Sangat Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Dit. Bina Penataan Bangunan
		d. Rekomendasi pengembangan bangunan gedung negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Penataan Bangunan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<p>e. Fasilitasi perhitungan nilai bahan atau material bangunan gedung negara yang masih dapat dijual kembali dalam rangka penghapusan bangunan gedung negara</p> <p>f. Rekomendasi terkait persyaratan dan prosedur pembangunan bangunan gedung negara</p> <p>g. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi penataan bangunan gedung</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Bina Penataan Bangunan</p> <p>Dit. Bina Penataan Bangunan</p> <p>Dit. Bina Penataan Bangunan</p>
	CK0403	<p>Pengelolaan Rumah Negara</p> <p>a. Data Rumah Negara Golongan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SK Golongan III</li> <li>2) Surat Ijin Penghunian</li> <li>3) Surat Keterangan Lunas Sewa</li> <li>4) Surat Keputusan Penjualan</li> <li>5) Surat Perjanjian Sewa Beli</li> </ol>	<p>Terbatas</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Bina Penataan Bangunan</p>

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		6) Surat Keterangan Tanda Lunas Sewa Beli 7) Surat Keputusan Pelepasan Hak Milik  b. Pengelolaan Rumah Negara Golongan I, Golongan II, dan Golongan III c. Pendaftaran pengalihan status Rumah Negara d. Penghunian dan supervisi rumah negara Golongan III e. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan rumah negara	Terbatas  Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Penataan Bangunan  Dit. Bina Penataan Bangunan  Dit. Bina Penataan Bangunan  Dit. Bina Penataan Bangunan
	CK0404	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus a. Pembangunan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Penataan Bangunan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Penataan Bangunan
		c. Inventarisasi data dan pengembangan jaringan kemitraan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Penataan Bangunan
		d. Fasilitasi penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam bidang penataan bangunan dan lingkungan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Penataan Bangunan
		e. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi penataan bangunan dan lingkungan khusus	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Penataan Bangunan
	CK0405	Kelembagaan a. Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Penataan Bangunan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Pelembagaan pengaturan  c. Pengembangan jejaring kemitraan  d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi kelembagaan pembinaan penataan bangunan	Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Penataan Bangunan  Dit. Bina Penataan Bangunan  Dit. Bina Penataan Bangunan
5	CK05  CK0501	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  Perencanaan Teknis a. Perencanaan dan analisa teknis  b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknis pengembangan sistem penyediaan ari minum	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Air Minum  Dit. Air Minum

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	CK0502	<p>Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan</p> <p>a. Pelaksanaan pembangunan SPAM di perkotaan</p> <p>b. Fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum termasuk penanggulangan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial di wilayah perkotaan</p> <p>c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset SPAM di perkotaan</p> <p>d. Pengembangan jejaring kemitraan SPAM di perkotaan</p> <p>e. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi SPAM di perkotaan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Air Minum</p>

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	CK0503	<p>Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan</p> <p>a. Pelaksanaan pembangunan SPAM di perdesaan</p> <p>b. Fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum termasuk penanggulangan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial di wilayah perdesaan</p> <p>c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset SPAM di perdesaan</p> <p>d. Pengembangan jejaring kemitraan SPAM di perdesaan</p> <p>e. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi SPAM di perdesaan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Air Minum</p> <p>Dit. Air Minum</p> <p>Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman</p> <p>Dit. Air Minum</p> <p>Dit. Air Minum</p>

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	CK0504	<p>Sistem Penyediaan Air Minum Khusus</p> <p>a. Pelaksanaan pembangunan SPAM khusus</p> <p>b. Fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum termasuk penanggulangan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial di wilayah khusus</p> <p>c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset SPAM khusus</p> <p>d. Pengembangan jejaring kemitraan SPAM khusus</p> <p>e. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi SPAM khusus</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Air Minum</p> <p>Dit. Air Minum</p> <p>Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman</p> <p>Dit. Air Minum</p> <p>Dit. Air Minum</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	CK0505	Kelembagaan a. Kelembagaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum  b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi kelembagaan pengembangan SPAM	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Air Minum  Dit. Air Minum
	CK0506	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum a. Penilaian dan fasilitasi kinerja sistem penyediaan air minum  b. Rekomendasi peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum  c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Air Minum  Dit. Air Minum  Dit. Air Minum
	CK0507	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Air Minum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6	CK06 CK0601	<p>Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Perencanaan Teknis</p> <p>a. Dokumen rencana dan analisa teknis sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan</p> <p>b. Laporan hasil pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman</p> <p>c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknis pengembangan penyehatan lingkungan permukiman</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Sanitasi</p> <p>Dit. Sanitasi</p> <p>Dit. Sanitasi</p>
	CK0602	<p>Pengelolaan Air Limbah</p> <p>a. Pembangunan konstruksi terkait pengelolaan air limbah domestik</p> <p>1) Gambar desain</p> <p>2) Dokumen teknis</p> <p>b. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Sanitasi</p> <p>Dit. Sanitasi</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan air limbah	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sanitasi
	CK0603	Pengelolaan Persampahan a. Pembangunan pengelolaan persampahan 1) Gambar desain 2) Dokumen teknis b. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan persampahan	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sanitasi  Dit. Sanitasi  Dit. Sanitasi
	CK0604	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus a. Pembangunan pengembangan penyehatan lingkungan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sanitasi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Inovasi dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sanitasi
		c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sanitasi
		d. Pengembangan jejaring kemitraan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sanitasi
		e. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi penyehatan lingkungan permukiman khusus	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sanitasi
	CK0605	Kelembagaan				
		a. Fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sanitasi
		b. Kelembagaan penyelenggaraan sistem air limbah, drainase, dan persampahan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sanitasi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi kelembagaan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sanitasi
	CK0606	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sanitasi
7	CK07	Pemantauan dan Evaluasi a. Perumusan kebijakan dan strategi cipta karya  b. Keterpaduan infrastruktur permukiman  c. Pengembangan Kawasan Permukiman	Terbatas  Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman  Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman  Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Bina penataan bangunan  e. Pengembangan sistem penyediaan air minum  f. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Terbatas  Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Penataan Bangunan  Dit. Air Minum  Dit. Sanitasi
IV 1	RU RU01	<b>PERUMAHAN</b> Perumusan Kebijakan dan Strategi Perumahan  a. Perumusan kebijakan dan strategi perumahan 1) Penyiapan rancangan kebijakan dan strategi perumahan 2) Final draft kebijakan dan strategi perumahan 3) Proses harmonisasi kebijakan dan strategi perumahan 4) Hasil kebijakan dan strategi perumahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Sosialisasi kebijakan dan strategi perumahan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
2	RU02  RU0201	Perencanaan dan Pembiayaan Perumahan Keterpaduan Perencanaan a. Perencanaan pembangunan perumahan: 1) jangka panjang 2) jangka menengah 3) rencana kerja pemerintah tahunan  b. Berkas usulan  c. Koordinasi perencanaan dengan pemda, bank, dan instansi terkait  d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi keterpaduan perencanaan dan pembiayaan perumahan	Terbatas           Terbatas           Terbatas           Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama           Pimpinan Tinggi Pratama           Pimpinan Tinggi Pratama           Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja           Memiliki dampak yang mengganggu kinerja           Memiliki dampak yang mengganggu kinerja           Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan           Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan           Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan           Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	RU0202	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan a. Penyusunan strategi pembiayaan perumahan  b. Analisis pasar perumahan  c. Kajian ekonomi makro pasar perumahan  d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi strategi pembiayaan dan analisa pasar perumahan	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan  Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan  Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan  Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
	RU0203	Kemitraan a. Kemitraan  b. Penyiapan kerja sama di bidang pembiayaan perumahan	Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan  Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi kemitraan perencanaan dan pembiayaan perumahan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
3	RU03 RU0301	<p>Pola Pembiayaan Perumahan Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum</p> <p>a. Fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara konvensional dan syariah.</p> <p>1) Pelaksanaan kebijakan</p> <p>2) Skema pembiayaan</p> <p>3) Penjaminan atau asuransi</p> <p>4) Dana murah jangka panjang untuk kepemilikan rumah melalui kredit perumahan</p>	<p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Administrator</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama Pimpinan Tinggi Pratama Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Rumah Umum dan Komersial</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Koordinasi dan sinkronisasi kemudahan dan bantuan rumah umum  c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pola pembiayaan perumahan rumah umum	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Umum dan Komersial  Dit. Rumah Umum dan Komersial
	RU0302	Pola Pembiayaan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan  a. Fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara konvensional dan syariah 1) Pelaksanaan kebijakan  2) Skema pembiayaan  3) Penjaminan atau asuransi	Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas  Terbatas	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Swadaya  Dit. Rumah Swadaya  Dit. Rumah Swadaya

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		4) Dana murah jangka panjang untuk kepemilikan rumah melalui kredit perumahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Swadaya
		b. Koordinasi dan sinkronisasi kemudahan dan bantuan rumah swadaya dan mikro perumahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja
		c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pola pembiayaan perumahan swadaya dan mikro perumahan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Swadaya
	RU0303	Pola Investasi Perumahan				
		a. Pola investasi rumah tapak secara konvensional dan syariah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
		b. Pola investasi rumah susun secara konvensional dan syariah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pola investasi perumahan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
4	RU04 RU0401	Pendayagunaan Sumber Daya Pembiayaan Perumahan Sumber Pembiayaan Primer a. Pembiayaan bank	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
		b. Pembiayaan bukan bank	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
		c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pendayagunaan sumber pembiayaan primer	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
	RU0402	Sumber Pembiayaan Sekunder a. Pembiayaan secara konvensional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Pembiayaan secara syariah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
		c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pendayagunaan sumber pembiayaan sekunder	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
	RU0403	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya				
		a. Pembiayaan dengan tabungan perumahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
		b. Pembiayaan lainnya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
		c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pendayagunaan sumber tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5	RU05	Sistem Pembiayaan Perumahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
6	RU06	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan a. Layanan Pembiayaan Perumahan 1) Sosialisasi dan promosi  2) Kerja sama dengan bank  3) Verifikasi tagihan	Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas  Terbatas	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan  Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan  Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Pencairan dan pengembalian dana pembiayaan perumahan 1) Yang melunasi sesuai jangka waktu  2) Yang mempercepat pelunasan  3) Yang gagal melunasi  c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dana pembiayaan perumahan	Terbatas  Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan  Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan  Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan  Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
7	RU07 RU0701	Perencanaan Penyediaan Perumahan Keterpaduan Perencanaan a. Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan jangka panjang b. Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan jangka menengah c. Koordinasi dan keterpaduan rencana kerja pemerintah tahunan d. Penyusunan rencana rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersial e. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi keterpaduan perencanaan penyediaan perumahan	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan  Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	RU0702	Analisa Teknik a. Hasil analisa teknik rumah susun b. Hasil analisa teknik rumah khusus c. Hasil analisa teknik rumah negara d. Hasil analisa teknik rumah swadaya e. Hasil analisa teknik rumah umum f. Hasil analisa teknik rumah komersial	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
	RU0703	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian a. Rencana pengembangan lingkungan skala besar dan bukan skala besar b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi rencana pengembangan lingkungan hunian	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan  Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	RU0704	Kemitraan dan Kelembagaan a. Kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah  b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi kemitraan dan kelembagaan perencanaan penyediaan perumahan	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan  Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
8	RU08 RU0801	Penyediaan Rumah Susun Perencanaan Teknik a. Rencana dan analisa teknik penyediaan rumah susun  b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknik penyediaan rumah susun	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Susun  Dit. Rumah Susun
	RU0802	Penyediaan a. Penyelenggaraan penyediaan rumah susun  1) Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Susun

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4) Sertifikat Laik Fungsi 5) Izin Operasional  b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penyediaan rumah susun	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Susun
	RU0803	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan a. Administrasi penghunian rumah susun, pengalihan, dan pemanfaatan rumah susun  b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan penyediaan rumah susun	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Susun  Dit. Rumah Susun
	RU0804	Pengelolaan a. Pengelolaan rumah susun b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penyediaan rumah susun	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Susun
9	RU09	Penyediaan Rumah Khusus				

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	RU0901	Perencanaan Teknik a. Rencana dan analisa teknik penyediaan rumah khusus  b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknik penyediaan rumah khusus	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Khusus  Dit. Rumah Khusus
	RU0902	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus a. Penyelenggaraan penyediaan rumah khusus 1) Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) 2) Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4) Sertifikat Laik Fungsi 5) Izin Operasional b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi penyediaan dan pengelolaan rumah tapak khusus	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Khusus  Dit. Rumah Khusus

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
10	RU10	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya				
	RU1001	Perencanaan Teknik				
		a. Rencana dan analisa teknik pada penyelenggaraan bantuan rumah swadaya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Swadaya
		b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknik penyediaan bantuan rumah swadaya	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Swadaya
	RU1002	Fasilitasi <i>Backlog</i> Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni				
		a. Hasil pendataan termasuk hasil verifikasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Swadaya
		b. Pemberdayaan masyarakat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Swadaya
		c. Akses kemitraan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Swadaya

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Penyertifikatan hak atas tanah milik calon penerima bantuan e. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi fasilitasi backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Swadaya  Dit. Rumah Swadaya
	RU1003	Pelaksanaan Bantuan Stimulan a. Administrasi penerima bantuan  b. Tata laksana pendampingan bantuan stimulan  c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan bantuan stimulan	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Swadaya  Dit. Rumah Swadaya  Dit. Rumah Swadaya
11	RU11 RU1101	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial Perencanaan Teknik a. Rencana dan analisa teknik pada penyediaan rumah umum dan komersial	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Umum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknik penyediaan rumah umum dan komersial	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Umum
	RU1102	Pemberian Bantuan Rumah Umum	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Umum
	RU1103	Fasilitasi Hunian Berimbang				
		a. Penyediaan rumah umum dan komersial pada rumah tunggal	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Umum
		b. Penyediaan rumah umum dan komersial pada rumah deret	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Umum
		c. Penyediaan rumah umum dan komersial pada rumah susun komersial	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Umum
		d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi fasilitasi hunian berimbang	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Umum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	RU1104	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II
12	RU12	Pemantauan dan Evaluasi a. Pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan dan strategi perumahan  b. Pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pembiayaan perumahan  c. Pemantauan dan evaluasi pola pembiayaan perumahan	Terbatas   Terbatas   Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama   Pimpinan Tinggi Pratama   Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan   Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan   Dit. Rumah Umum dan Komersial, Dit. Rumah Swadaya, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Pemantauan dan evaluasi pendayagunaan sumber daya pembiayaan perumahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
		e. Pemantauan dan evaluasi sistem pembiayaan perumahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
		f. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana pembiayaan perumahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
		g. Pemantauan dan evaluasi perencanaan penyediaan perumahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
		h. Pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah susun	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Susun
		i. Pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah khusus	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Khusus

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		j. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan bantuan rumah swadaya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Swadaya
		k. Pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah umum dan komersial	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Rumah Umum
<b>V</b> 1	<b>BK</b> BK01	<b>BINA KONSTRUKSI</b> Perumusan Kebijakan dan Strategi Bina Konstruksi a. Perumusan kebijakan dan strategi bina konstruksi 1) Penyiapan rancangan kebijakan dan strategi bina konstruksi 2) Final draft kebijakan dan strategi bina konstruksi 3) Proses harmonisasi kebijakan dan strategi bina konstruksi 4) Hasil kebijakan dan strategi bina konstruksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat Ditjen. Bina Konstruksi, Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi, Dit. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Dit. Keberlanjutan Konstruksi, Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Sosialisasi kebijakan dan strategi bina konstruksi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat Ditjen. Bina Konstruksi, Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi, Dit. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Dit. Keberlanjutan Konstruksi, Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi
2	BK02 BK0201	Investasi Infrastruktur Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur a. Sinkronisasi kebijakan pembiayaan infrastruktur PUPR	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Rencana investasi infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Studi pendahuluan investasi infrastruktur PUPR</li> <li>2) Pra studi kelayakan awal investasi PUPR</li> <li>3) Pra studi kelayakan akhir investasi PUPR</li> </ul>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Pelaksanaan investasi infrastruktur PUPR  1) Tahapan penyiapan investasi infrastruktur PUPR  2) Transaksi kerja sama investasi infrastruktur PUPR	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Kerja sama pemerintah dan badan usaha 1) Identifikasi dan seleksi proyek potensial kerja sama pemerintah  2) Penyusunan rencana pembiayaan infrastruktur PUPR  3) Pelaksanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		e. Pengembangan sistem manajemen pembiayaan infrastruktur	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		f. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan investasi infrastruktur	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	BK0202	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur  a. Sinkronisasi investasi infrastruktur	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Kemitraan dan koordinasi pelaksanaan penggabungan infrastruktur	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi investasi infrastruktur	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	BK0203	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur a. Penyelesaian permasalahan pengembangan investasi infrastruktur  b. Fasilitasi pembinaan perusahaan BUMN Perum di PUPR	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan  Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>c. Pemberian layanan konsultasi dan fasilitasi manajemen dan mitigasi resiko pembiayaan infrastruktur PUPR</p> <p>d. Pengelolaan manajemen dan mitigasi risiko pembiayaan</p>	<p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Administrator</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan</p> <p>Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		e. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi fasilitasi dan mitigasi risiko investasi infrastruktur	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	BK0204	Pasar Infrastruktur	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
3	BK03 BK0301	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi
	BK0302	Kontrak Konstruksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	BK0303	Konstruksi Berkelanjutan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Keberlanjutan Konstruksi
	BK0304	Manajemen Mutu	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Keberlanjutan Konstruksi
4	BK04 BK0401	Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kelembagaan a. Kelembagaan pemerintah dan masyarakat  b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi kelembagaan jasa konstruksi	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi  Dit. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
	BK0402	Material dan Peralatan Konstruksi a. Pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	BK0403	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri a. Pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
	BK0404	Usaha Jasa Konstruksi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
5	BK05 BK0501	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Standar dan Materi Kompetensi a. Penerapan standar dan materi kompetensi profesi jasa konstruksi dan produktivitas konstruksi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
	BK0502	Penerapan Kompetensi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	BK0503	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi a. Pengembangan profesi jasa konstruksi 1) penyusunan profil tenaga ahli konstruksi profesional 2) identifikasi kebutuhan program penyediaan standar dan pedoman dalam pengembangan jasa profesi konstruksi 3) masukan teknis pengaturan penetapan honor profesi konstruksi 4) <i>mutual recognition arrangements on engineering services and architectural services</i>	Terbatas   Biasa/Umum/ Terbuka   Biasa/Umum/ Terbuka   Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama   Pejabat Administrator   Pejabat Administrator   Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi   Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi   Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi   Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		5) bantuan teknis manajemen pelaksanaan penyetaraan kompetensi regional 6) <i>Mutual Recognition Arrangements</i> (MRA) dan strategi implementasinya 7) Pelaksanaan registrasi kompetensi jasa konstruksi b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengembangan profesi jasa konstruksi	Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi  Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi  Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi  Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
	BK0504	Pengembangan Produktivitas a. Pengembangan produktivitas konstruksi 1) Kajian pengaturan upah minimum dalam pengukuran produktivitas tenaga terampil di proyek konstruksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2) Kajian pengaturan imbal jasa minimum tenaga terampil terhadap peningkatan produktivitas jasa konstruksi  3) Profil produktivitas dan daya saing konstruksi Indonesia  4) Sinkronisasi upaya peningkatan kesiapan daya saing tenaga kerja konstruksi muda tingkat terampil  5) Kajian pendayagunaan teknologi konstruksi dalam mendukung peningkatan produktivitas  6) Bantek manajemen produktivitas kerja konstruksi	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi  Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi  Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi  Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi  Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		7) Roadmap peningkatan produktivitas Indonesia	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
		b. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengembangan produktivitas	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
6	BK06 BK0601	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Peningkatan Kerjasama	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Balai Jasa Konstruksi
	BK0602	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi
		a. Pemberdayaan jasa konstruksi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi
		b. Penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengembangan jasa konstruksi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi
7	BK07 BK0701	Peningkatan Jasa Konstruksi Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja a. Koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja dengan lembaga pemerintah dan masyarakat dibidang peningkatan kapasitas jasa konstruksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Balai Jasa Konstruksi, Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi dan Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
	BK0702	Pelaksanaan Pengendalian Mutu a. Pelaksanaan pengendalian mutu di bidang peningkatan kapasitas jasa konstruksi b. Penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Balai Jasa Konstruksi  Balai Jasa Konstruksi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
8	BK08 BK0801	Penerapan Teknologi Konstruksi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
	BK0802	Pengembangan Materi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
9	BK09	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi a. Pendayagunaan material dan peralatan konstruksi  b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi di bidang peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi	Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas	Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi  Dit. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
10	BK10	Pemantauan dan Evaluasi a. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dan strategi bina konstruksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat Ditjen. Bina Konstruksi, Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi, Dit. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Dit. Keberlanjutan Konstruksi, Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Pemantauan dan evaluasi bina investasi infrastruktur	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
		c. Pemantauan dan evaluasi bina penyelenggaraan jasa konstruksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi dan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Pemantauan dan evaluasi bina kelembagaan dan sumber daya konstruksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
		e. Pemantauan dan evaluasi bina kompetensi dan produktivitas konstruksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
		f. Pemantauan dan evaluasi kerja sama dan pemberdayaan jasa konstruksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi dan Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
		g. Pemantauan dan evaluasi jasa konstruksi oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Balai Jasa Konstruksi
		h. Pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi konstruksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi



<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur wilayah	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
2	IW02  IW0201	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Antarsektor a. Penyusunan rencana aksi keterpaduan antarsektor 1) Dokumen rencana outlook rencana infrastruktur  2) Dokumen rencana induk dan profil pengembangan wilayah pulau kepulauan  b. Analisa manfaat dan analisa input-output pembangunan infrastruktur PUPR	  Terbatas    Terbatas	  Pimpinan Tinggi Pratama   Pimpinan Tinggi Pratama	  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	  Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional   Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1) Hasil analisa manfaat pembangunan infrastruktur PUPR  2) Hasil analisa input-output pembangunan infrastruktur PUPR  c. Bimbingan keterpaduan antarsektor dan antartingkat pemerintah jangka panjang dan menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat 1) Hasil bimbingan keterpaduan antarsektor pemerintah jangka panjang 2) Hasil bimbingan keterpaduan antartingkat pemerintah jangka panjang	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional  Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional  Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		3) Hasil bimbingan keterpaduan antartingkat pemerintah jangka menengah  4) Hasil bimbingan keterpaduan antartingkat pemerintah jangka menengah				
	IW0202	Antarwilayah a. Penyusunan rencana keterpaduan antarsektor jangka panjang dan menengah  1) Rencana keterpaduan antarwilayah jangka panjang  2) Rencana keterpaduan antarwilayah jangka menengah	Terbatas          Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama          Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja          Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional          Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Penyusunan rencana induk	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III
		c. Penyusunan rencana pengembangan infrastruktur terpadu 1) Pulau/kepulauan 2) Antarwilayah pengembangan strategis 3) Antarkawasan strategis nasional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
		d. Penyusunan rencana pengembangan infrastruktur terpadu lingkup antarwilayah pengembangan strategis	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
		e. Penyusunan rencana pengembangan infrastruktur terpadu lingkup antarkawasan strategis nasional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi rencana pengembangan infrastruktur PUPR antarwilayah	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
3	IW03  IW0301	Pengembangan Kawasan Strategis Keterpaduan infrastruktur kawasan strategis a. Rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan strategis  b. Dokumen <i>Masterplan</i> /Rencana Induk pembangunan kawasan strategis  c. Pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis	  Terbatas   Terbatas   Terbatas	  Pimpinan Tinggi Pratama   Pimpinan Tinggi Pratama   Pimpinan Tinggi Pratama	  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	  Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional   Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III   Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi keterpaduan infrastruktur kawasan strategis	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	IW0302	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis a. Dokumen rencana pembangunan infrastruktur PUPR/development plan PUPR  b. <i>Master plan</i> dan <i>Development plan</i> WPS (Wilayah Pengembangan Stretegis)  c. Pengembangan area inkubasi pada antarwilayah pengembangan strategis	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III
			Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III
			Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengembangan infrastruktur antarkawasan strategis	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III
4	IW04  IW0401	Pengembangan Kawasan Perkotaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan a. <i>Masterplan</i> dan <i>Development plan</i> Pengembangan Kawasan Metropolitan  b. Dokumen kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan dengan infrastruktur PUPR	Terbatas          Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama          Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja          Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III          Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan  d. Dokumen studi kelayakan dan pra desain area inkubasi pengembangan kawasan perkotaan  e. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengembangan infrastruktur kawasan metropolitan	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III  Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III  Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III
	IW0402	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru a. <i>Masterplan</i> dan <i>Development plan</i> pengembangan kawasan kota besar dan kota baru	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Dokumen kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kota besar dan kota baru dengan infrastruktur PUPR  c. Pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru  d. Dokumen studi kelayakan dan pra desain area inkubasi pengembangan infrastruktur kawasan kota besar dan kota baru  e. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengembangan infrastruktur kawasan kota besar dan kota baru	Terbatas  Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional  Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III  Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III  Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	IW0403	<p>Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Perdesaan</p> <p>a. <i>Masterplan dan Development plan</i> pengembangan kawasan Kota Kecil dan Perdesaan</p> <p>b. <i>Masterplan dan Development plan</i> pengembangan kawasan Perdesaan Prioritas Nasional</p> <p>c. <i>Masterplan dan Development plan</i> Pengembangan Kawasan Perdesaan Strategis</p> <p>d. Dokumen kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kota kecil dan perdesaan dengan infrastruktur PUPR</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III</p> <p>Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III</p> <p>Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III</p> <p>Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		e. Pengembangan area inkubasi di kota kecil dan perdesaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III
		f. Dokumen studi kelayakan dan pra desain area inkubasi pengembangan infrastruktur kawasan kota kecil dan perdesaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III
		g. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengembangan infrastruktur kawasan kota kecil dan perdesaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III
5	IW05	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan a. Analisis hasil dan manfaat pengembangan infrastruktur terpadu	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<p>b. Pengembangan skema pembiayaan bidang PUPR</p> <p>c. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi analisa manfaat dan skema pembiayaan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional</p> <p>Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional</p>
6	IW06	<p>Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)</p> <p>a. Sinkronisasi program dan dana pembangunan jangka tahunan dalam keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat</p>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional



<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<p>d. Penyiapan strategi dan keterpaduan program pembiayaan infrastruktur PUPR</p> <p>e. Pengusahaan penggunaan dana non-APBN prastudi kelayakan awal dan akhir</p> <p>f. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi program dan pembiayaan infrastruktur PUPR</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III</p> <p>Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III</p> <p>Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III</p>
7	IW07	<p>Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>a. Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis dan strategi</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional</p>

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Pemantauan dan evaluasi rencana pengembangan infrastruktur  c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan strategis  d. Pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan perkotaan  e. Pemantauan dan evaluasi analisa manfaat dan skema pembiayaan	Terbatas  Terbatas  Terbatas  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional  Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III  Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III  Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		f. Pemantauan dan evaluasi sinkronisasi program dan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III
<b>VII</b>	<b>LB</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				
1	LB01  LB0101	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Sumber Daya Kelitbangan a. Peningkatan kapasitas SDM litbang 1) Sertifikasi personil peneliti  2) Karya Tulis Ilmiah  b. Laporan pengelolaan sarana litbang	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air  Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air  Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	LB0102	Penelitian a. Rencana penelitian 1) masterplan/rencana strategis penelitian 2) proposal dan survei rencana kerja tahunan penelitian b. administrasi pelaksanaan penelitian (surat tugas, surat penunjukan ketua, surat perjalanan dinas, formulir) c. administrasi penggunaan peralatan (alat dan bahan) d. Pelaksanaan penelitian 1) prosedur/petunjuk 2) data primer 3) <i>log book</i> 4) studi kelayakan 5) instrumen penelitian 6) pelaksanaan survey 7) laporan hasil pendataan/survey 8) analisis/pengolahan data	Terbatas  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator  Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air  Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		e. Hasil penelitian 1) Laporan hasil penelitian dan hasil luaran 2) Rekomendasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air
	LB0103	Pengkajian a. Rekaman pengkajian 1) Studi referensi 2) Penyusunan instrumen penelitian 3) Pengumpulan data/survey 4) Analisis data 5) Hasil rumusan/kajian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air
	LB0104	Perekayasaan a. Dokumen penerapan/ pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi/ prototype hasil penelitian/ pengkajian/ perekayasaan	Terbatas	Pejabat Tinggi Madya	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air
	LB0105	Pengembangan a. Pengembangan dan inovasi 1) Rencana kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) Administrasi pengembangan dan inovasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air
		3) Pelaksanaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air
		4) Hasil pengembangan dan inovasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air
	LB0106	Penerapan a. Dokumen penerapan/ pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi/ prototype hasil penelitian/ pengkajian/ perekayasaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air
	LB0107	Standar, Pedoman, Manual a. Perumusan standarisasi kebijakan  b. Hasil standarisasi kebijakan (Standar, Pedoman, Manual) dan buku petunjuk	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air  Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	LB0108	Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan a. Dokumen penerapan/ pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi/ prototype hasil penelitian/ pengkajian/ perencanaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air
2	LB02 LB0201	Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Sumber Daya Kelitbangan a. Peningkatan kapasitas SDM litbang 1) Sertifikasi personil peneliti 2) Karya Tulis Ilmiah b. Laporan pengelolaan sarana litbang	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
	LB0102	Penelitian a. Rencana penelitian 1) masterplan/rencana strategis penelitian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>2) proposal dan survei rencana kerja tahunan penelitian</p> <p>b. administrasi pelaksanaan penelitian (surat tugas, surat penunjukan ketua, surat perjalanan dinas, formulir)</p> <p>c. administrasi penggunaan peralatan (alat dan bahan)</p> <p>d. Pelaksanaan penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prosedur/petunjuk</li> <li>2) data primer</li> <li>3) <i>log book</i></li> <li>4) studi kelayakan</li> <li>5) instrumen penelitian</li> <li>6) pelaksanaan survey</li> <li>7) laporan hasil pendataan/survey</li> <li>8) analisis/pengolahan data</li> </ol> <p>e. Hasil penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan hasil penelitian dan hasil luaran</li> <li>2) Rekomendasi</li> </ol>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p> <p>Pejabat Administrator</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan</p>

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	LB0203	Pengkajian a. Rekaman pengkajian 1) Studi referensi 2) Penyusunan instrumen penelitian 3) Pengumpulan data/survey 4) Analisis data 5) Hasil rumusan/kajian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
	LB0204	Perekayasaan a. Dokumen penerapan/ pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi/ prototype hasil penelitian/ pengkajian/ perekayasaan	Terbatas	Pejabat Tinggi Madya	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
	LB0205	Pengembangan a. Pengembangan dan inovasi 1) Rencana kerja  2) Administrasi pengembangan dan inovasi	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan  Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		3) Pelaksanaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
		4) Hasil pengembangan dan inovasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
	LB0206	Penerapan a. Dokumen penerapan/ pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi/ prototype hasil penelitian/ pengkajian/ perekayasaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
	LB0207	Standar, Pedoman, Manual a. Perumusan standarisasi kebijakan  b. Hasil standarisasi kebijakan (Standar, Pedoman, Manual) dan buku petunjuk	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan  Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	LB0208	Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan a. Dokumen penerapan/ pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi/ prototype hasil penelitian/ pengkajian/ perencanaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan
3	LB03 LB0301	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Sumber Daya Kelitbangan a. Peningkatan kapasitas SDM litbang 1) Sertifikasi personil peneliti  2) Karya Tulis Ilmiah  b. Laporan pengelolaan sarana litbang	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan  Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan  Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	LB0302	Penelitian a. Rencana penelitian 1) masterplan/rencana strategis penelitian  2) proposal dan survei rencana kerja tahunan penelitian  b. administrasi pelaksanaan penelitian (surat tugas, surat penunjukan ketua, surat perjalanan dinas, formulir)  c. administrasi penggunaan peralatan (alat dan bahan)  d. Pelaksanaan penelitian 1) prosedur/petunjuk 2) data primer 3) <i>log book</i> 4) studi kelayakan 5) instrumen penelitian	Terbatas     Terbatas     Biasa/Umum/ Terbuka     Biasa/Umum/ Terbuka     Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama     Pimpinan Tinggi Pratama     Pejabat Administrator     Pejabat Administrator     Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja     Memiliki dampak yang mengganggu kinerja     Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja     Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja     Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan     Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		6) pelaksanaan survey 7) laporan hasil pendataan/survey 8) analisis/pengolahan data  e. Hasil penelitian 1) Laporan hasil penelitian dan hasil luaran 2) Rekomendasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
	LB0303	Pengkajian a. Rekaman pengkajian 1) Studi referensi 2) Penyusunan instrumen penelitian 3) Pengumpulan data/survey 4) Analisis data 5) Hasil rumusan/kajian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
	LB0304	Perekayasaan a. Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/ replikasi/prototype hasil penelitian/pengkajian/ perekayasaan	Terbatas	Pejabat Tinggi Madya	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	LB0305	Pengembangan a. Pengembangan dan inovasi 1) Rencana kerja  2) Administrasi pengembangan dan inovasi  3) Pelaksanaan  4) Hasil pengembangan dan inovasi	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka  Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator  Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan  Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan  Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan  Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
	LB0306	Penerapan a. Dokumen penerapan/ pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi/ prototype hasil penelitian/ pengkajian/ perekayasaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	LB0307	Standar, Pedoman, Manual a. Perumusan standarisasi kebijakan  b. Hasil standarisasi kebijakan (Standar, Pedoman, Manual) dan buku petunjuk	Terbatas  Biasa/Umum/ Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama  Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan  Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
	LB0308	Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan a. Dokumen penerapan/ pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi/ prototype hasil penelitian/ pengkajian/ perekayasaan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan



NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Laporan pengelolaan sarana litbang	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
	LB0402	Penelitian a. Rencana penelitian 1) masterplan/rencana strategis penelitian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>2) proposal dan survei rencana kerja tahunan penelitian</p> <p>b. administrasi pelaksanaan penelitian (surat tugas, surat penunjukan ketua, surat perjalanan dinas, formulir)</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Umum/ Terbuka</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan</p> <p>Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan</p>

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>c. administrasi penggunaan peralatan (alat dan bahan)</p> <p>d. Pelaksanaan penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prosedur/petunjuk</li> <li>2) data primer</li> <li>3) <i>log book</i></li> <li>4) studi kelayakan</li> <li>5) instrumen penelitian</li> <li>6) pelaksanaan survey</li> <li>7) laporan hasil pendataan/survey</li> <li>8) analisis/pengolahan data</li> </ol>	<p>Biasa/Umum/ Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Administrator</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan</p> <p>Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan</p>

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Hasil penelitian 1) Laporan hasil penelitian dan hasil luaran 2) Rekomendasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
	LB0403	Pengkajian a. Rekamian pengkajian 1) Studi referensi 2) Penyusunan instrumen penelitian 3) Pengumpulan data/survey 4) Analisis data 5) Hasil rumusan/kajian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	LB0404	Perekayasaan a. Dokumen penerapan/ pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi/ prototype hasil penelitian/ pengkajian/ perekayasaan	Terbatas	Pejabat Tinggi Madya	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
	LB0405	Pengembangan a. Pengembangan dan inovasi 1) Rencana kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan



NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		4) Hasil pengembangan dan inovasi	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
	LB0406	Penerapan a. Dokumen penerapan/ pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi/ prototype hasil penelitian/ pengkajian/ perancangan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan



NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	LB0408	Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan a. Dokumen penerapan/ pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi/ prototype hasil penelitian/ pengkajian/ perancangan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
5	LB05	Karya Tulis <i>Master Proceeding</i> a. Diseminasi dan sosialisasi a. promosi b. penyebarluasan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PUPR	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. <i>Master proceeding</i> /jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi a. penerbitan: jurnal/buletin ilmiah, bahan publikasi khusus b. leaflet dan booklet c. kamus istilah	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PUPR	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
6	LB06	<i>Policy Paper</i> /Rekomendasi a. Policy Paper/Rekomendasi/Policy Brief/Hasil Kajian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
7	LB07 LB0701	Jasa Layanan Pengujian a. Jasa laboratorium pengujian b. Jasa tekonologi produksi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
	LB0702	Advis Teknis a. Jasa perbantuan tenaga ahli/profesi 1) Laporan 2) Rekomendasi teknis	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	LB0703	Sertifikasi a. Jasa layanan sertifikasi 1) Survey 2) Uji kelayakan 3) Pelaksanaan 4) Pelaporan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
	LB0704	Kalibrasi a. Jasa pengujian kalibrasi/ <i>clearing house</i> 1) Surat permohonan 2) Metode pengujian 3) Hasil akhir pengujian	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Rekaman bahan pengujian (kalibrasi/ <i>clearing house</i> ) 1) Data registrasi pengujian 2) Sertifikat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
	LB0705	Akreditasi a. Jasa akreditasi b. Akreditasi laboratorium	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
8	LB08	Alih Teknologi	Terbatas	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
9	LB09	Penyebarluasan Hasil Penelitian dan Pengembangan a. Diseminasi dan sosialisasi 1) promosi 2) pemasyarakatan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PUPR	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
10	LB10	Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) a. Tukar informasi hasil litbang b. Penelitian bersama c. Studi banding	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian PUPR	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
11	LB11	Pemantauan dan Evaluasi a. Pemantauan dan evaluasi b. Pelaporan	Terbatas	Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Dit. Bina Teknik Sumber Daya Air, Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Dit. Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	<p><b>SM</b></p> <p>SM01</p>	<p><b>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b></p> <p>Perumusan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>a. Proses penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan sumber daya manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyiapan rancangan kebijakan dan strategi pengembangan sumber daya manusia</li> <li>2) Final draft kebijakan dan strategi pengembangan sumber daya manusia</li> <li>3) Proses harmonisasi kebijakan dan strategi pengembangan sumber daya manusia</li> <li>4) Hasil kebijakan dan strategi pengembangan sumber daya manusia</li> </ol>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat BPSDM

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Sosialisasi kebijakan dan strategi pengembangan sumber daya manusia	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat BPSDM
2	SM02  SM0201	Inventarisasi Pendidikan dan Pelatihan  Perencanaan Kebutuhan a. Hasil inventarisasi kebutuhan diklat b. Hasil analisa kebutuhan diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	SM0202	Sistem dan Metode Diklat a. Pedoman penyelenggaraan diklat b. Program diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	SM0203	Kurikulum/Silabus a. Kurikulum b. Silabus	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	SM0204	Bahan Ajar/Modul a. Modul b. Bahan ajar	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
3	SM03 SM0301	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Diklat Prajabatan a. Berkas penyelenggaraan diklat 1) Surat pemberitahuan diklat  2) Surat permohonan narasumber  3) Penentuan peserta diklat	Biasa/Umum/ Terbuka    Biasa/Umum/ Terbuka    Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator    Pejabat Administrator    Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja    Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja    Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		4) Daftar nama peserta dan narasumber	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
		5) Daftar hadir peserta dan narasumber	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
		6) Jadwal Kegiatan diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		7) Laporan diklat  8) Sertifikat Diklat	Biasa/Umum/ Terbuka  Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator  Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR  Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
	SM0302	Diklat Kepemimpinan a. Berkas penyelenggaraan diklat 1) Surat pemberitahuan diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2) Surat permohonan narasumber	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
		3) Penentuan peserta diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
		4) Daftar nama peserta dan narasumber	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		5) Daftar hadir peserta dan narasumber	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
		6) Jadwal Kegiatan diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
		7) Laporan diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		8) Sertifikat Diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
	SM0303	Diklat Fungsional a. Berkas penyelenggaraan diklat 1) Surat pemberitahuan diklat  2) Surat permohonan narasumber	Biasa/Umum/ Terbuka   Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator   Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR   Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		3) Penentuan peserta diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
		4) Daftar nama peserta dan narasumber	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
		5) Daftar hadir peserta dan narasumber	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		6) Jadwal Kegiatan diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
		7) Laporan diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
		8) Sertifikat Diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	SM0304	Diklat Teknis a. Berkas penyelenggaraan diklat 1) Surat pemberitahuan diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) Surat permohonan narasumber	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		3) Penentuan peserta diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		4) Daftar nama peserta dan narasumber	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		5) Daftar hadir peserta dan narasumber	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		6) Jadwal Kegiatan diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		7) Laporan diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		8) Sertifikat Diklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Air
4	SM04	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan a. Penyelenggaraan pendidikan melalui Politeknik PUPR: 1) Proses Penerimaan: - Pengumuman  - Pelaksanaan Ujian  - Keputusan Hasil Ujian  - Wawancara	Biasa/Umum/ Terbuka   Terbatas  Terbatas  Terbatas	Pejabat Administrator   Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama  Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Politeknik Pekerjaan Umum  Politeknik Pekerjaan Umum  Politeknik Pekerjaan Umum  Politeknik Pekerjaan Umum

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2) Penetapan pengumuman kelulusan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Politeknik Pekerjaan Umum
		3) Berkas lamaran yang tidak diterima	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Politeknik Pekerjaan Umum
		4) Daftar nama mahasiswa dan Nomor Induk Mahasiswa	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Politeknik Pekerjaan Umum
		5) Daftar hadir mahasiswa dan pengajar	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Politeknik Pekerjaan Umum
		6) Jadwal Kegiatan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Politeknik Pekerjaan Umum
		7) Laporan pendidikan kedinasan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Politeknik Pekerjaan Umum
		8) Ijazah/Sertifikat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Politeknik Pekerjaan Umum

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Penyelenggaraan pendidikan melalui LPDP atau Beasiswa: 1) Permohonan untuk melanjutkan studi S2 dan S3  2) Surat rekomendasi pendidikan kedinasan  3) Daftar nama karyasiswa yang lulus  4) Laporan pengembangan karyasiswa	Biasa/Umum/ Terbuka   Biasa/Umum/ Terbuka   Biasa/Umum/ Terbuka   Terbatas	Pejabat Administrator   Pejabat Administrator   Pejabat Administrator   Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja   Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Unit Organisasi Pengusul, Biro Kepegawaian dan Ortala, dan Sekretariat BPSDM   Biro Kepegawaian dan Ortala dan Sekretariat BPSDM   Biro Kepegawaian dan Ortala dan Sekretariat BPSDM   Biro Kepegawaian dan Ortala dan Sekretariat BPSDM

NOMOR	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		5) Pengembangan Tugas Belajar - Surat Keterangan Lulus - Ijazah yang sudah Dilegalisir - Tesis atau Disertasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala dan Sekretariat BPSDM
		6) Surat pengantar pengembalian tugas belajar dari Pusdiklat	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala dan Sekretariat BPSDM
		7) Surat pengaktifan kembali status sebagai pegawai	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Biro Kepegawaian dan Ortala dan Sekretariat BPSDM

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5	SM05	Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan a. Bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Data alumni	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Karir dan kualifikasi tenaga pendidik	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6	SM06	Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan a. Instrumen/formulir pasca pendidikan dan pelatihan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		b. Instrumen wawancara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		c. Surat undangan FGD dan Lokakarya Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		d. Surat permohonan narasumber	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		e. Daftar nama peserta dan narasumber	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		f. Daftar hadir	Biasa/Umum/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

<b>NOMOR</b>	<b>KODE KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR PERTIMBANGAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		g. Laporan akhir	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.

NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES  
ARSIP DINAMIS

**PENGAMANAN ARSIP DINAMIS**

NO	JENIS PENGAMANAN	KLASIFIKASI KEAMANAN			
		BIASA/UMUM/ TERBUKA	TERBATAS	RAHASIA	SANGAT RAHASIA
<b>Arsip Konvensional</b>					
1.	Penyimpanan Arsip	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.	a. Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap “TERBATAS” pada fisik arsip.  b. Tidak sembarangan meletakkan arsip/dokumen yang bersifat terbatas.	a. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap “RAHASIA” pada fisik arsip.  b. Tidak sembarangan meletakkan arsip/dokumen yang bersifat rahasia.	a. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap “SANGAT RAHASIA” pada fisik arsip.  b. Tidak sembarangan meletakkan arsip/dokumen yang bersifat sangat rahasia.

NO	JENIS PENGAMANAN	KLASIFIKASI KEAMANAN			
		BIASA/UMUM/ TERBUKA	TERBATAS	RAHASIA	SANGAT RAHASIA
2.	Prasarana dan Sarana Penyimpanan Arsip	<p>a. lemari arsip (<i>filling cabinet</i>) atau rak besi</p> <p>b. Penggunaan prasarana dan sarana penyimpanan disesuaikan dengan kondisi ruangan dan fisik arsip.</p>	<p>a. Filling cabinet atau lemari arsip geser (<i>Roll O'Pack</i>)</p> <p>b. Penggunaan prasarana dan sarana penyimpanan disesuaikan dengan kondisi ruangan dan fisik arsip.</p> <p>c. Penyimpanan hardcopy dan arsip dalam format apapun yang terekam dalam media elektronik yang dapat dipindah-pindahkan serta tidak dienkripsi harus dilakukan di tempat penyimpanan yang terkunci atau suatu area yang aman.</p>	<p>a. Lemari arsip besi, lemari arsip geser (<i>Roll O'Pack</i>) atau brankas (<i>safety box</i>)</p> <p>b. Penggunaan prasarana dan sarana penyimpanan disesuaikan dengan kondisi ruangan dan fisik arsip.</p> <p>c. Penyimpanan hardcopy dan arsip dalam format apapun yang terekam dalam media elektronik yang dapat dipindah-pindahkan serta tidak dienkripsi harus dilakukan di tempat penyimpanan yang terkunci atau suatu area yang aman.</p>	<p>a. Lemari arsip besi, lemari arsip geser (<i>Roll O'Pack</i>) atau brankas (<i>safety box</i>)</p> <p>b. Penggunaan prasarana dan sarana penyimpanan disesuaikan dengan kondisi ruangan dan fisik arsip.</p> <p>c. Penyimpanan hardcopy dan arsip dalam format apapun yang terekam dalam media elektronik yang dapat dipindah-pindahkan serta tidak dienkripsi harus dilakukan di tempat penyimpanan yang terkunci atau suatu area yang aman.</p>

NO	JENIS PENGAMANAN	KLASIFIKASI KEAMANAN			
		BIASA/UMUM/ TERBUKA	TERBATAS	RAHASIA	SANGAT RAHASIA
3.	Pengguna Akses Arsip	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.
4.	Penyampaian/ Pengiriman Arsip	Tidak ada persyaratan prosedur khusus.	Internal Kementerian PUPR: a. Apabila disampaikan secara tidak langsung, maka dokumen harus dimasukkan ke dalam amplop tidak tembus pandang yang disegel dan diberi label TERBATAS. b. Apabila disampaikan secara langsung, maka dokumen harus tertutup, dan dengan syarat bahwa pengiriman tersebut dilakukan secara langsung oleh petugas pelaksana.	Internal Kementerian PUPR: a. Apabila disampaikan secara tidak langsung, maka dokumen harus dimasukkan ke dalam amplop tidak tembus pandang yang disegel dan diberi label RAHASIA. b. Apabila disampaikan secara langsung, maka dokumen harus tertutup, dan dengan syarat bahwa pengiriman tersebut dilakukan secara langsung oleh petugas pelaksana.	Internal Kementerian PUPR: a. Apabila disampaikan secara tidak langsung, maka dokumen harus dimasukkan ke dalam amplop tidak tembus pandang yang disegel dan diberi label SANGAT RAHASIA. b. Apabila disampaikan secara langsung, maka dokumen harus tertutup, dan dengan syarat bahwa pengiriman tersebut dilakukan secara langsung oleh petugas pelaksana.

NO	JENIS PENGAMANAN	KLASIFIKASI KEAMANAN			
		BIASA/UMUM/ TERBUKA	TERBATAS	RAHASIA	SANGAT RAHASIA
			<p>Eksternal Kementerian PUPR:</p> <p>Dokumen harus dimasukkan ke dalam amplop tidak tembus pandang yang disegel dan diberi label TERBATAS. Pengiriman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Disampaikan secara langsung oleh petugas pelaksana.</li> <li>Dikirimkan oleh suatu jasa kurir yang telah mendapat pengakuan.</li> <li>Dikirimkan melalui jasa pos.</li> </ol>	<p>Eksternal Kementerian PUPR:</p> <p>Dokumen harus dimasukkan ke dalam amplop tidak tembus pandang yang disegel dan diberi label RAHASIA. Pengiriman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Disampaikan secara langsung oleh petugas pelaksana.</li> <li>Dikirimkan oleh suatu jasa kurir yang telah mendapat pengakuan.</li> <li>Dikirimkan melalui jasa pos.</li> </ol>	<p>Eksternal Kementerian PUPR:</p> <p>Dokumen harus dimasukkan ke dalam amplop tidak tembus pandang yang disegel dan diberi label SANGAT RAHASIA. Pengiriman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Disampaikan secara langsung oleh petugas pelaksana.</li> <li>Dikirimkan oleh suatu jasa kurir yang telah mendapat pengakuan.</li> <li>Dikirimkan melalui jasa pos.</li> </ol>
5.	Petugas Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki rasa tanggungjawab dalam menjaga fisik arsip dan kerahasiaan informasi yang terkandung di dalam arsip</li> <li>Memastikan keamanan akses arsip</li> <li>Memastikan permohonan akses arsip sudah mendapatkan izin dari pimpinan yang memiliki hak akses</li> <li>Mencatat administrasi permohonan akses arsip</li> </ol>			

NO	JENIS PENGAMANAN	KLASIFIKASI KEAMANAN			
		BIASA/UMUM/ TERBUKA	TERBATAS	RAHASIA	SANGAT RAHASIA
<b>Arsip Elektronik</b>					
1.	Penyimpanan Arsip	Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip.	<p>a. Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip.</p> <p>b. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal.</p> <p>c. Menggunakan sandi untuk dapat membuka akses file elektronik.</p>	<p>a. Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip</p> <p>b. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal</p> <p>c. Menggunakan sandi untuk dapat membuka akses file elektronik.</p>	<p>a. Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip</p> <p>b. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal</p> <p>c. Menggunakan sandi untuk dapat membuka akses file elektronik.</p>
2.	Prasarana dan Sarana Penyimpanan Arsip	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus	<p>a. Autentikasi server.</p> <p>b. Langkah-langkah keamanan dengan Operating System khusus atau aplikasi khusus.</p>	<p>a. Autentikasi server.</p> <p>b. Langkah-langkah keamanan dengan Operating System khusus atau aplikasi khusus.</p>	<p>a. Autentikasi server.</p> <p>b. Langkah-langkah keamanan dengan Operating System khusus atau aplikasi khusus.</p>

NO	JENIS PENGAMANAN	KLASIFIKASI KEAMANAN			
		BIASA/UMUM/ TERBUKA	TERBATAS	RAHASIA	SANGAT RAHASIA
			<p>c. Menggunakan perangkat komputer dengan sistem keamanan dengan kode pin akses komputer.</p> <p>d. Penyimpanan hardcopy dan arsip dalam format apapun yang terekam dalam media elektronik yang dapat dipindah-pindahkan serta tidak dienkripsi harus dilakukan di tempat penyimpanan yang terkunci atau suatu area yang aman.</p>	<p>c. Menggunakan perangkat komputer dengan sistem keamanan dengan kode pin akses komputer.</p> <p>d. Penyimpanan hardcopy dan arsip dalam format apapun yang terekam dalam media elektronik yang dapat dipindah-pindahkan serta tidak dienkripsi harus dilakukan di tempat penyimpanan yang terkunci atau suatu area yang aman.</p>	<p>c. Menggunakan perangkat komputer dengan sistem keamanan dengan kode pin akses komputer.</p> <p>d. Penyimpanan hardcopy dan arsip dalam format apapun yang terekam dalam media elektronik yang dapat dipindah-pindahkan serta tidak dienkripsi harus dilakukan di tempat penyimpanan yang terkunci atau suatu area yang aman.</p>

NO	JENIS PENGAMANAN	KLASIFIKASI KEAMANAN			
		BIASA/UMUM/ TERBUKA	TERBATAS	RAHASIA	SANGAT RAHASIA
			c. Penempatan server dan peralatan yang berkaitan dengan pengolahan atau penyimpanan data arsip berklasifikasi keamanan TERBATAS harus dilakukan dengan menggunakan fasilitas keamanan yang memadai.	c. Penempatan server dan peralatan yang berkaitan dengan pengolahan atau penyimpanan data arsip berklasifikasi keamanan RAHASIA harus dilakukan dengan menggunakan fasilitas keamanan yang memadai.	c. Penempatan server dan peralatan yang berkaitan dengan pengolahan atau penyimpanan data arsip berklasifikasi keamanan SANGAT RAHASIA harus dilakukan dengan menggunakan fasilitas keamanan yang memadai.
3.	Pengguna Akses Arsip	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	<p>a. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ password atau ID digital).</p> <p>b. Penggunaan untuk log in pada tingkat individual.</p>	<p>a. Hanya staf yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang memberi akses untuk dapat mengakses arsip tersebut.</p> <p>b. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ password atau ID digital).</p> <p>c. Penggunaan untuk log in pada tingkat individual.</p>	<p>a. Hanya staf yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang memberi akses untuk dapat mengakses arsip tersebut.</p> <p>b. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ password atau ID digital).</p> <p>Penggunaan untuk log in pada tingkat individual.</p>

NO	JENIS PENGAMANAN	KLASIFIKASI KEAMANAN			
		BIASA/UMUM/TERBUKA	TERBATAS	RAHASIA	SANGAT RAHASIA
4.	Penyampaian/ Pengiriman Arsip	Tidak ada prosedur khusus.	Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, pengiriman dilakukan melalui email pu.go.id	a. Pengiriman dilakukan melalui email pu.go.id b. Arsip elektronik menggunakan persandian atau kriptografi. c. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email.	a. Pengiriman dilakukan melalui email pu.go.id b. Arsip elektronik menggunakan persandian atau kriptografi. c. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email. d. Harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau email.
5.	Petugas Pelaksana	a. Memiliki rasa tanggungjawab dalam menjaga fisik arsip dan kerahasiaan informasi yang terkandung di dalam arsip b. Memastikan keamanan akses arsip c. Memastikan permohonan akses arsip sudah mendapatkan izin dari pimpinan yang memiliki hak akses d. Mencatat administrasi permohonan akses arsip			

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.

NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO [jdih.pu.go.id](http://jdih.pu.go.id)